

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam empat dekade terakhir, Indonesia mengalami transisi demografis dari tingkat kelahiran dan kematian tinggi ke tingkat kelahiran dan kematian rendah. Angka kelahiran total turun lebih dari separuh, dari 5,6 anak per perempuan menurut hasil Sensus Penduduk 1971 menjadi 2,4 anak per perempuan menurut hasil Sensus Penduduk 2010. Sementara itu, angka kematian bayi turun secara nyata dari 145 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menjadi 26 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada periode yang sama. Transisi demografis ini telah mengakibatkan perubahan dalam struktur umur penduduk Indonesia, berupa peningkatan persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) relatif terhadap penduduk usia tidak produktif muda (0-14 tahun) dan penduduk usia tidak produktif tua (65 tahun ke atas).

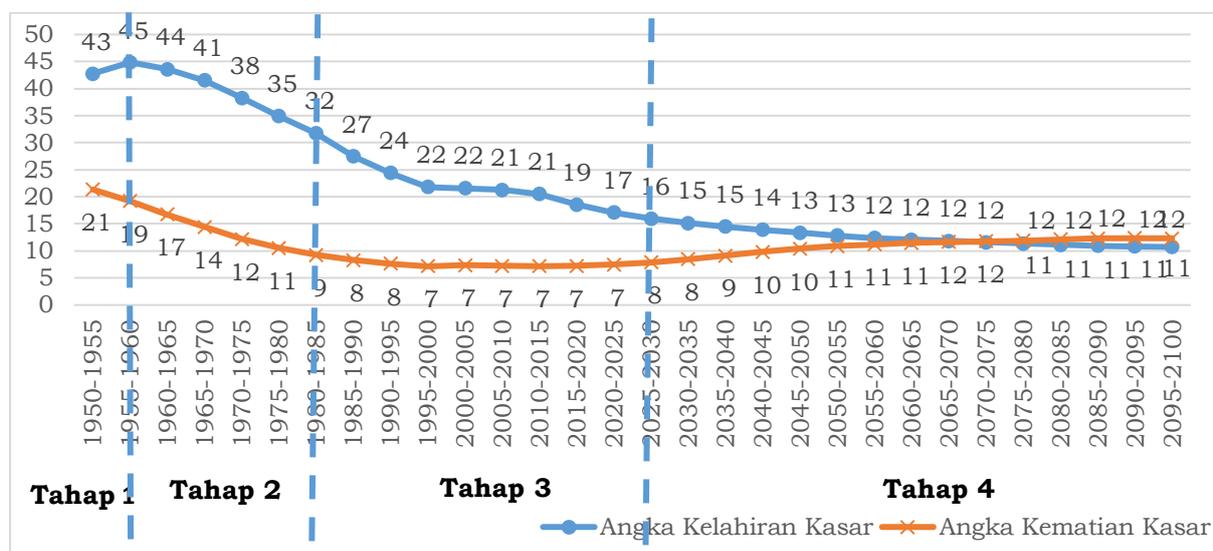
Perkiraan angka kelahiran kasar dan angka kematian pada periode 1950-2100 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN 2015) menunjukkan bahwa Indonesia mengalami tahap 1 transisi demografis setelah perang kemerdekaan selesai (Gambar 1.1). Tingkat kelahiran tinggi dan angka kelahiran kasar meningkat dari 43 kelahiran per 1.000 penduduk pada periode 1950-1955 menjadi 45 kelahiran pada periode 1955-1960. Tahap 2 transisi demografis di Indonesia terjadi pada periode 1960-1985 ketika tingkat kematian turun lebih cepat daripada tingkat kelahiran. Pada periode ini jumlah penduduk usia 0-14 tahun meningkat sehingga tanggungan penduduk usia tidak produktif muda meningkat.

Indonesia mengalami tahap 3 transisi demografis sejak tahun 1985 ketika tingkat kelahiran turun dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada tingkat kematian. Tahap 3 transisi demografis di Indonesia diperkirakan akan berlangsung hingga periode 2025-2030 ketika angka fertilitas total sudah mencapai tingkat kelahiran tingkat penggantian penduduk (2,1 anak per perempuan). Pada tahap ini persentase penduduk usia tidak produktif muda menurun sehingga tanggungan penduduk usia tidak produktif muda menurun, sementara jumlah penduduk usia tidak produktif tua secara perlahan meningkat sehingga tanggungan penduduk usia tidak produktif tua secara perlahan juga meningkat. Indonesia diperkirakan

akan mengalami tahap 4 transisi demografis sejak periode 2030-2035 ketika tingkat kelahiran dan kematian sama-sama sudah rendah. Sejak periode 2030-2035 persentase penduduk usia tidak produktif muda dan persentase penduduk usia produktif diperkirakan akan terus menurun, sementara jumlah penduduk usia tidak produktif tua terus meningkat sehingga tanggungan penduduk usia tidak produktif tua akan terus meningkat.

Gambar 1.1

Angka Kelahiran Kasar dan Angka Kematian Kasar: Indonesia 1950-2100



Sumber: UN (2015) (diolah).

Transisi demografis telah, sedang, dan akan memberi peluang untuk menikmati bonus demografis berupa akselerasi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, khususnya akselerasi pertumbuhan ekonomi, melalui pemanfaatan jendela kesempatan demografis peningkatan persentase penduduk usia produktif dengan kebijakan-kebijakan strategis yang mendukung, khususnya kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesempatan kerja yang layak, produktif dan remuneratif. Periode tahap 2 dan 3 transisi demografis merupakan jendela kesempatan demografis untuk menuai bonus demografis tahap 1. Jadi, bonus demografis tahap 1 terbatas karena persentase penduduk usia produktif suatu saat akan berkurang yang mengakibatkan rasio ketergantungan umur (rasio antara jumlah penduduk usia tidak produktif muda dan tua dengan jumlah penduduk usia produktif) meningkat. Sementara itu, periode tahap 4 transisi

demografis merupakan jendela kesempatan demografis untuk menuai bonus demografis tahap 2. Bonus demografis tahap 2 tidak terbatas karena disumbang oleh penduduk usia tidak produktif tua yang akan meningkat terus jumlahnya, jika penduduk usia tidak produktif tua sehat, produktif dan memiliki investasi.

Hasil studi oleh Maliki (2014) menunjukkan bahwa, berdasarkan pola konsumsi dan produksi, bonus demografis tahap 1 memberi kontribusi kurang dari satu persen terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sementara bonus demografis tahap 2 memberi kontribusi sekitar 1,8%. Selanjutnya, hasil studi pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia menemukan bahwa kenaikan angka pertumbuhan jumlah angkatan kerja sebesar satu persen mengakibatkan kenaikan dalam angka pertumbuhan ekonomi sebesar 0,46%, sementara kenaikan angka pertumbuhan rasio ketergantungan umur sebesar satu persen mengakibatkan penurunan dalam angka pertumbuhan ekonomi sebesar 0,31% (Rajagukguk dkk 2015). Selain itu, angka pertumbuhan jumlah angkatan kerja memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap angka pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan peran penting transisi demografis melalui peningkatan penduduk usia produktif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Akan tetapi, transisi demografis bervariasi antarprovinsi di Indonesia. Di provinsi-provinsi dimana pembangunan lebih maju dan program keluarga berencana (KB) nasional terlebih dahulu diimplementasikan, tingkat kelahiran dan kematian cenderung sudah mencapai tingkat yang rendah, seperti di DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, tingkat kelahiran dan kematian cenderung lebih tinggi di provinsi-provinsi dimana pembangunan lebih tertinggal dan program KB nasional diimplementasikan kemudian, seperti di Provinsi Maluku dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akibatnya, jendela kesempatan demografis untuk menuai bonus demografis bervariasi antarprovinsi. Di Yogyakarta merupakan provinsi pertama di Indonesia yang pada tahun 2020 akan mengakhiri jendela kesempatan demografis untuk menuai bonus demografis tahap 1. Sementara itu, dengan tingkat kelahiran yang relatif masih tinggi, jendela kesempatan demografis untuk menuai bonus demografis tahap 1 masih akan berlangsung hingga tahun 2035 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Apakah jendela kesempatan demografis untuk menuai bonus demografis tahap 1 di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah dimanfaatkan? Hasil studi oleh

Rajagukguk dkk (2015) menunjukkan bahwa jendela kesempatan demografis untuk menuai bonus demografis belum dimanfaatkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perencanaan pembangunan belum didasarkan pada situasi struktur umur penduduk dimana persentase penduduk usia produktif sedang meningkat. Meskipun demikian, Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini sedang menikmati bonus demografis berupa pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat serta peningkatan dalam pencapaian pembangunan. Pada periode 2010-2014 Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan angka pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling tinggi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa jika jendela kesempatan demografis untuk menuai bonus demografis tahap 1 dimanfaatkan maka pencapaian pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur akan lebih baik lagi.

Pemanfaatan jendela kesempatan demografis untuk menuai bonus demografis dapat dilakukan dengan mengelola kondisi kependudukan dan keluarga berencana mengingat laju pertumbuhan penduduk dan tingkat kelahiran relatif tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, penduduk usia produktif yang jumlahnya sedang meningkat juga harus dikelola agar mereka memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menuai bonus demografis yang lebih besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, kajian situasi dan permasalahan kependudukan, keluarga berencana dan ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dilakukan untuk mengidentifikasi strategi dan kebijakan pengelolaan kependudukan, keluarga berencana dan penduduk usia produktif untuk menuai bonus demografis di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2. Tujuan Penulisan

Secara umum tujuan kajian adalah untuk menganalisis optimalisasi penduduk usia produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Secara khusus tujuan kajian adalah sebagai berikut.

- a. Menganalisis situasi dan permasalahan kependudukan dan keluarga berencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Mempelajari situasi dan permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- c. Mengidentifikasi kebijakan dan strategi dalam pengelolaan kependudukan dan keluarga berencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- d. Mengidentifikasi kebijakan dan strategi dalam pengelolaan penduduk usia produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. Organisasi Penulisan

Laporan penulisan kajian ini terdiri dari lima bab. Pada Bab 1 disajikan latar belakang dan tujuan penulisan. Situasi dan permasalahan kependudukan dan keluarga berencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur dibahas pada Bab 2. Pada Bab 3 dijelaskan situasi dan permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Strategi dan kebijakan dalam pengelolaan kependudukan dan keluarga berencana dan penduduk usia produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur dibahas pada Bab 4. Kajian ini diakhiri dengan Penutup yang disajikan pada Bab 5.

BAB 2

SITUASI DAN PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1. Dinamika Kependudukan dan Pembangunan

Dinamika kependudukan memiliki hubungan yang timbal balik dengan pembangunan (UN 1995, Hayes 1995). Artinya, dinamika kependudukan menentukan pencapaian pembangunan dan merupakan hasil dari pembangunan. Negara-negara dengan laju pertumbuhan penduduk yang rendah cenderung memiliki pencapaian pembangunan yang lebih baik. Negara-negara dengan pencapaian pembangunan yang lebih baik cenderung memiliki laju pertumbuhan penduduk yang rendah. Sebagai contoh, secara global Norwegia dan Swiss masing-masing menduduki peringkat pertama dan ketiga dalam pencapaian pembangunan manusia. Angka pertumbuhan penduduk hanya sekitar satu persen di kedua negara ini.

Dinamika kependudukan meliputi proses demografis (*demographic process*) dan keluaran demografis (*demographic outcome*). Proses demografis terdiri dari kelahiran, kematian, dan migrasi. Keluaran demografis mencakup jumlah dan pertumbuhan penduduk, struktur umur dan jenis kelamin penduduk, serta persebaran penduduk. Proses demografis menentukan keluaran demografis. Jika tingkat kelahiran di suatu wilayah tinggi maka laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut tinggi.

Dinamika kependudukan mempengaruhi pembangunan melalui keluaran demografis. Keluaran demografis akan menentukan proses pembangunan, yang antara lain mencakup tabungan/investasi, pemanfaatan lahan dan tenaga kerja, konsumsi barang dan jasa, pengeluaran publik, serta perdagangan internasional dan keuangan. Sebagai contoh, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mengakibatkan tingkat tabungan dan investasi rendah, tekanan penduduk terhadap lahan besar, dan peningkatan angkatan kerja yang pesat. Hal ini selanjutnya dapat mengakibatkan produktivitas lahan dan tenaga kerja serta upah tenaga kerja rendah, yang kemudian dapat menyebabkan keunggulan komparatif

suatu wilayah rendah dan impor bahan baku dan perlengkapan produksi yang penting tinggi.

Pembangunan mempengaruhi dinamika kependudukan melalui keluaran pembangunan. Keluaran pembangunan meliputi tingkat dan jenis *output* barang dan jasa, tingkat upah dan jumlah pekerja, tingkat pendidikan, status kesehatan dan gizi, kualitas perumahan dan sanitasi serta kualitas lingkungan. Selanjutnya, keluaran pembangunan akan menentukan proses demografis. Akses terhadap pendidikan yang rendah, khususnya bagi perempuan, merupakan kontributor utama tingkat kelahiran yang tinggi. Akses terhadap layanan kesehatan yang rendah telah menyebabkan tingkat kematian tinggi di beberapa wilayah. Tingkat upah yang rendah di suatu wilayah telah mengakibatkan migrasi ke luar ke wilayah utama pembangunan.

2.2. Situasi Keluaran Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

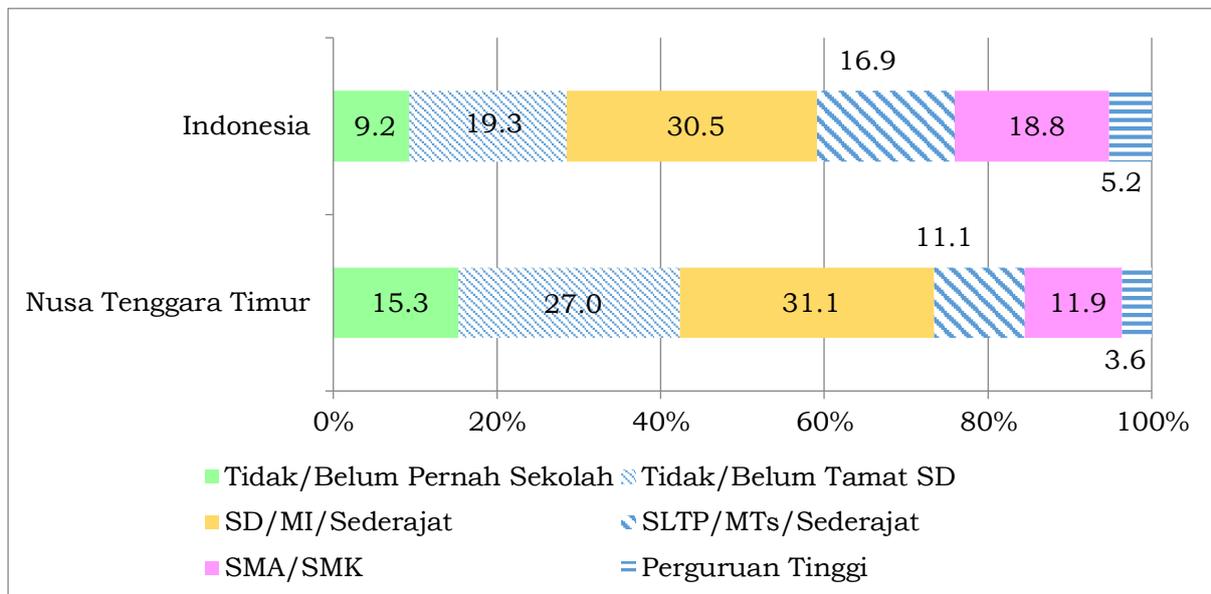
Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang tertinggal dalam pembangunan. Dalam hal pendidikan, penduduk usia lima tahun ke atas di Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,9 kali lebih cenderung untuk tamatan sekolah dasar (SD) atau kurang dan 0,5 kali kurang cenderung untuk berpendidikan menengah ke atas dibandingkan penduduk usia lima tahun ke atas di Indonesia secara keseluruhan (Gambar 2.1). Dalam hal partisipasi pendidikan, pada tahun 2015, secara nasional Angka Partisipasi Murni di Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor tujuh paling rendah untuk pendidikan SD, nomor tiga paling rendah untuk pendidikan sekolah menengah pertama, dan nomor empat paling rendah untuk pendidikan sekolah menengah atas.

Dalam hal kesehatan, derajat kesehatan dan akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih rendah daripada derajat kesehatan dan akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan nasional. Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 (Kementerian Kesehatan 2013) menunjukkan bahwa secara nasional prevalensi kurang gizi pada anak usia bawah lima tahun paling tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (lebih dari 50%). Prevalensi kurang gizi pada penduduk usia 5-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan usia 18 tahun ke atas juga termasuk yang paling tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu,

cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih rendah daripada cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan nasional. Selanjutnya, secara nasional prevalensi risiko kurang energi kronis pada perempuan usia 15-49 tahun paling tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lebih lanjut, pengetahuan tentang keberadaan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, bidan praktek dan rumah bersalin, serta pos pelayanan terpadu, termasuk yang paling rendah di di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 2.1

Penduduk berumur lima tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 2010



Sumber: sp2010.bps.go.id (diolah).

Dalam hal kualitas lingkungan, pada tahun 2014, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekitar 28% rumah tangga tidak memiliki akses terhadap sumber air minum bersih (air kemasan, air isi ulang, leding, sumur/bor pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung). Secara nasional angka ini sebesar 13%, paling rendah di DKI Jakarta (0,1%) dan paling tinggi di Kalimantan Barat (62,2%). Artinya, rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2,5 kali kurang cenderung untuk memiliki akses terhadap sumber air minum bersih daripada rumah tangga Indonesia secara keseluruhan.

Dalam hal penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, 62,5% dari rumah tangga di Indonesia menggunakan listrik atau gas/elpiji sebagai bahan bakar utama untuk memasak. Angka ini paling rendah di Maluku Utara (0,5%) dan paling tinggi di DKI Jakarta (87,7%). Hanya 1,4% dari rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan sebagai bahan bakar utama untuk memasak. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur hampir 122 kali kurang cenderung untuk menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan sebagai bahan bakar utama untuk memasak dibandingkan rumah tangga Indonesia secara keseluruhan.

Dalam hal sanitasi, pada tahun 2014, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekitar 87% rumah tangga akses tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak. Secara nasional angka ini sebesar 39%, paling rendah di DKI Jakarta (13%) dan paling tinggi di Nusa Tenggara Timur (87%). Artinya, rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur hampir 11 kali kurang cenderung untuk memiliki akses terhadap sanitasi layak daripada rumah tangga Indonesia secara keseluruhan.

Dalam hal kualitas perumahan, pada tahun 2014, 8,1% dari rumah tangga di Indonesia memiliki jenis lantai terluas rumah berupa tanah. Angka ini paling rendah di Kalimantan Timur (0,4) dan paling tinggi di Nusa Tenggara Timur (36%). Hal ini berarti rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih dari enam kali lebih cenderung untuk memiliki rumah dengan jenis lantai terluas tanah daripada rumah tangga di Indonesia secara keseluruhan.

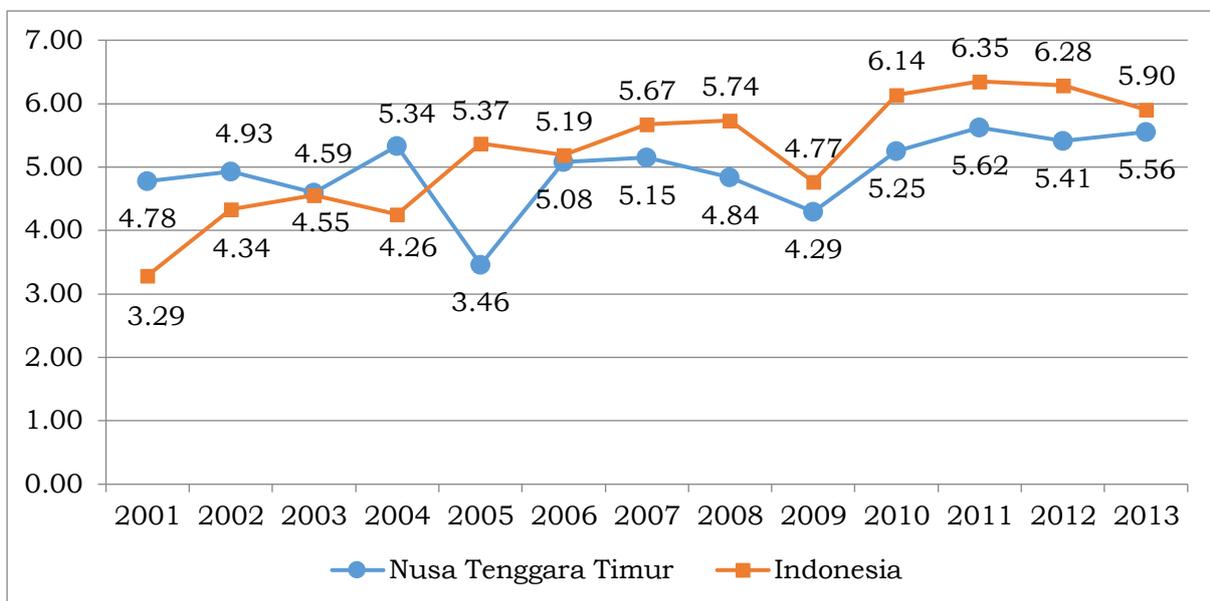
Dalam hal akses terhadap sumber energi, pada tahun 2014, hanya tiga persen dari rumah tangga di Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap sumber penerangan listrik. Angka ini paling rendah di DKI Jakarta (nol persen) dan paling tinggi di Papua (53%). Rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber penerangan listrik sebesar 26% di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Artinya, rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih dari 11 kali kurang cenderung untuk memiliki akses terhadap sumber penerangan listrik daripada rumah tangga Indonesia secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur berfluktuasi selama periode 2001-2013 dengan kecenderungan yang meningkat (Gambar 2.2). Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan di Provinsi

Nusa Tenggara Timur meningkat dari 4,8% pada tahun 2001 menjadi 5,6% pada tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional pada periode 2001-2004 dan lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi nasional pada periode 2005-2013, dengan perbedaan yang semakin mengecil pada tahun 2013. Hal ini berarti Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang mengejar pertumbuhan ekonomi nasional yang berpotensi untuk menciptakan bonus demografi.

Gambar 2.2

**Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan:
Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 2001-2013 (persen)**

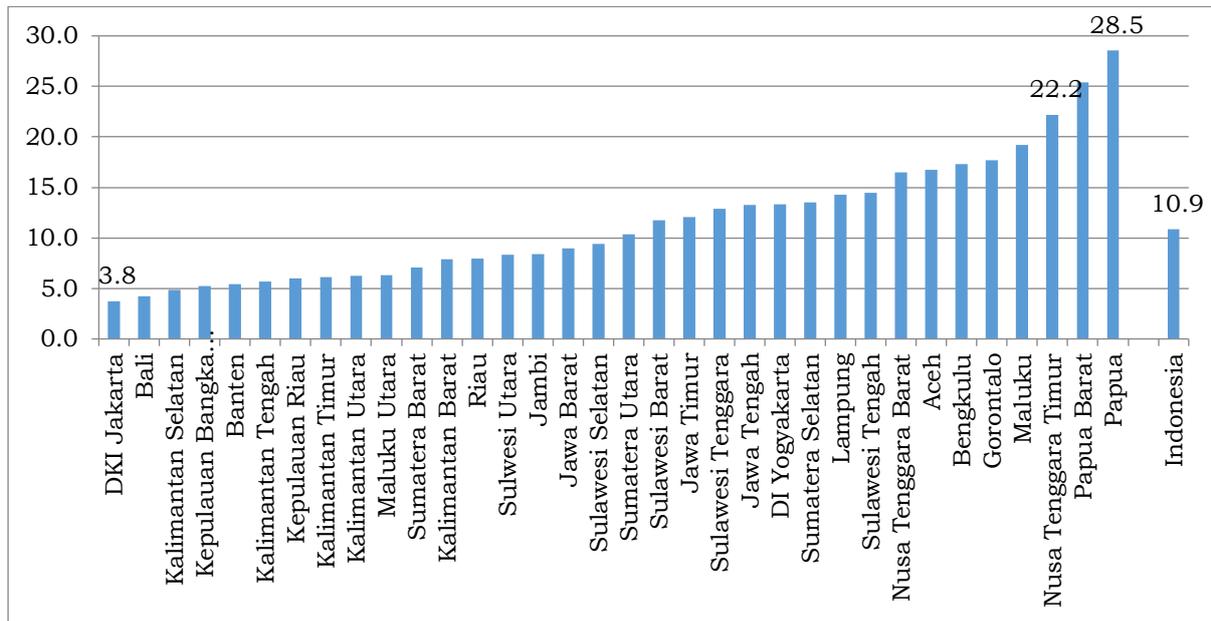


Sumber: www.bps.go.id (diolah).

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi paling miskin ketiga di Indonesia, setelah Papua dan Papua Barat (Gambar 2.3). Pada tahun 2016, secara nasional 11% dari penduduk Indonesia miskin. Angka ini paling rendah di DKI Jakarta (4%) dan paling tinggi di Papua (28%). Penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 22% pada tahun 2014. Artinya, penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2,3 kali lebih cenderung untuk miskin daripada penduduk Indonesia secara keseluruhan.

Gambar 2.3

Persentase penduduk miskin menurut provinsi: Indonesia Maret 2016



Sumber: www.bps.go.id (diolah).

Dengan situasi pembangunan yang tertinggal, Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan yang ke-32 dari 34 provinsi di Indonesia dalam hal pencapaian pembangunan manusia. Pada tahun 2015, indeks pembangunan manusia (IPM) nasional sebesar 69,6, terendah di Papua (57,3) dan tertinggi di DKI Jakarta (78,9). IPM Nusa Tenggara Timur sebesar 62,7 pada tahun 2015. Pencapaian pembangunan manusia yang relatif rendah ini turut berdampak pada proses demografis, kelahiran, kematian, dan migrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.2. Situasi Proses dan Keluaran Demografis di Provinsi Nusa Tenggara Timur

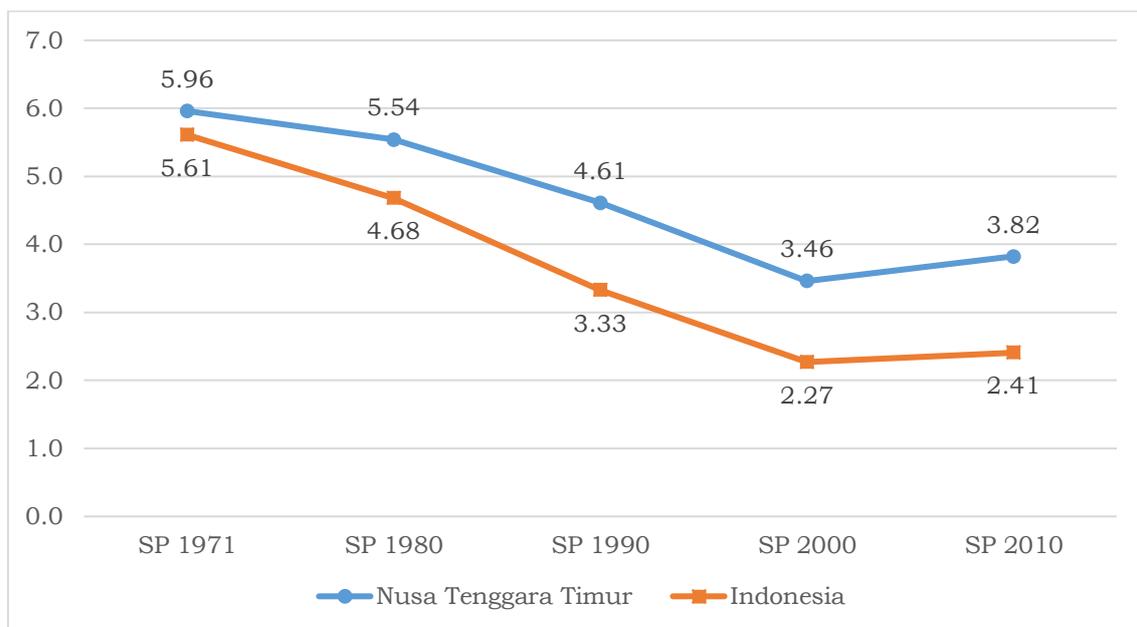
Tingkat kelahiran relatif tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, paling tinggi di Indonesia, dan secara konsisten lebih tinggi dari tingkat kelahiran nasional. Hasil Sensus Penduduk (SP) 1971 menunjukkan bahwa angka fertilitas total (*total fertility rate/TFR*) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 5,96 anak per perempuan, 0,35 anak per perempuan lebih tinggi daripada TFR nasional (Gambar 2.4). Selanjutnya, laju penurunan tingkat kelahiran di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih lambat dari laju penurunan tingkat kelahiran nasional. Selama periode 1971-2010, TFR Provinsi Nusa Tenggara Timur turun sebesar 36% menjadi

3,82 anak per perempuan, sementara TFR nasional turun sebesar 57% menjadi 2,41.

Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kemandekan penurunan fertilitas (*stalling fertility*) pada periode 2000-2010 dimana TFR naik dari 3,46 anak per perempuan menurut SP 2000 menjadi 3,82 anak per perempuan menurut SP 2010. Kemandekan penurunan fertilitas ini dapat disebabkan karena penduduk perempuan Timor-Leste yang datang ke Provinsi Nusa Tenggara Timur membawa perilaku fertilitas tinggi mereka yang menyebabkan fertilitas meningkat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 2.4

Angka Fertilitas Total: Nusa Tenggara Timur 1971-2010 (anak per perempuan)



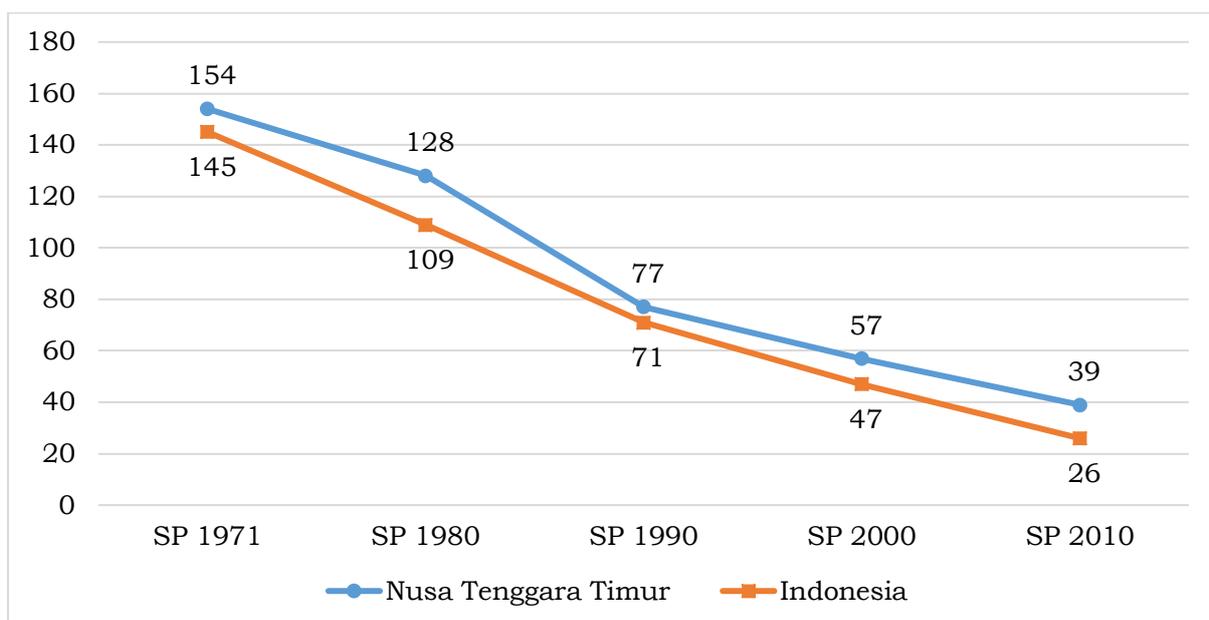
Sumber: www.bps.go.id (diolah).

Relatif tingginya dan lambatnya penurunan tingkat kelahiran di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Secara budaya, keluarga-keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Timur memilih mempunyai anak banyak, terutama di daerah perdesaan, karena anak dipandang mempunyai nilai ekonomi bagi rumah tangga. Anak dipandang oleh orang tua mereka dan anggota keluarga lain sebagai suatu aset yang berharga dan sebagai suatu sumber keamanan.

Selain itu, orang tua akan bergantung pada anak untuk jaminan hari tua mereka karena sumber daya yang terbatas, ketidakamanan pangan, dan derajat moneterisasi ekonomi yang rendah. Selanjutnya, preferensi anak banyak berarti lebih banyak anggota keluarga berbagi pekerjaan rumah tangga, seperti mengambil air atau kayu bakar bahkan pada usia yang muda.

Tingkat kematian juga relatif tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, menduduki urutan kedelapan paling tinggi, dan secara konsisten lebih tinggi daripada tingkat kematian nasional. Hasil SP 1971 menunjukkan bahwa angka kematian bayi (AKB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 154 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, lebih tinggi sembilan kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup daripada AKB nasional (Gambar 2.5). Selanjutnya, laju penurunan tingkat kematian di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih lambat dari laju penurunan tingkat kematian nasional. Selama periode 1971-2010, AKB Provinsi Nusa Tenggara Timur turun sebesar 75% menjadi 39 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, sementara AKB nasional turun sebesar 82% menjadi 26. Hal ini mengindikasikan bahwa bayi di Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,5 kali lebih cenderung untuk mengalami kematian bayi daripada bayi Indonesia secara keseluruhan.

Gambar 2.5
Angka Kematian Bayi: Nusa Tenggara Timur 1971-2010
(kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup)



Sumber: www.bps.go.id (diolah).

Tingkat kematian yang relatif tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disebabkan oleh cakupan pelayanan kesehatan maternal yang relatif rendah di provinsi ini. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan bahwa sebagian besar persalinan (59%) di Provinsi Nusa Tenggara Timur terjadi bukan di suatu fasilitas kesehatan. Cakupan persalinan di suatu fasilitas kesehatan secara nasional adalah 63%, paling rendah di Maluku Utara (21%) dan paling tinggi di Bali (98%). Selain itu, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih kualifikasi tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sekitar 57%. Angka ini sebesar 83% secara nasional, paling rendah di Papua (40%) dan paling tinggi di DKI Jakarta (98,7%). Selanjutnya, cakupan pelayanan bayi baru lahir (*postnatal care*) sekitar 37% di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Angka ini sebesar 48% secara nasional, paling rendah di Papua (11%) dan paling tinggi di DI Yogyakarta (90%). Artinya, cakupan persalinan di suatu fasilitas kesehatan, persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan pelayanan bayi baru lahir di Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing 2,5 kali, 3,7 kali dan 1,6 kali lebih rendah daripada cakupan persalinan di suatu fasilitas kesehatan, persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan pelayanan bayi baru lahir di Indonesia secara keseluruhan.

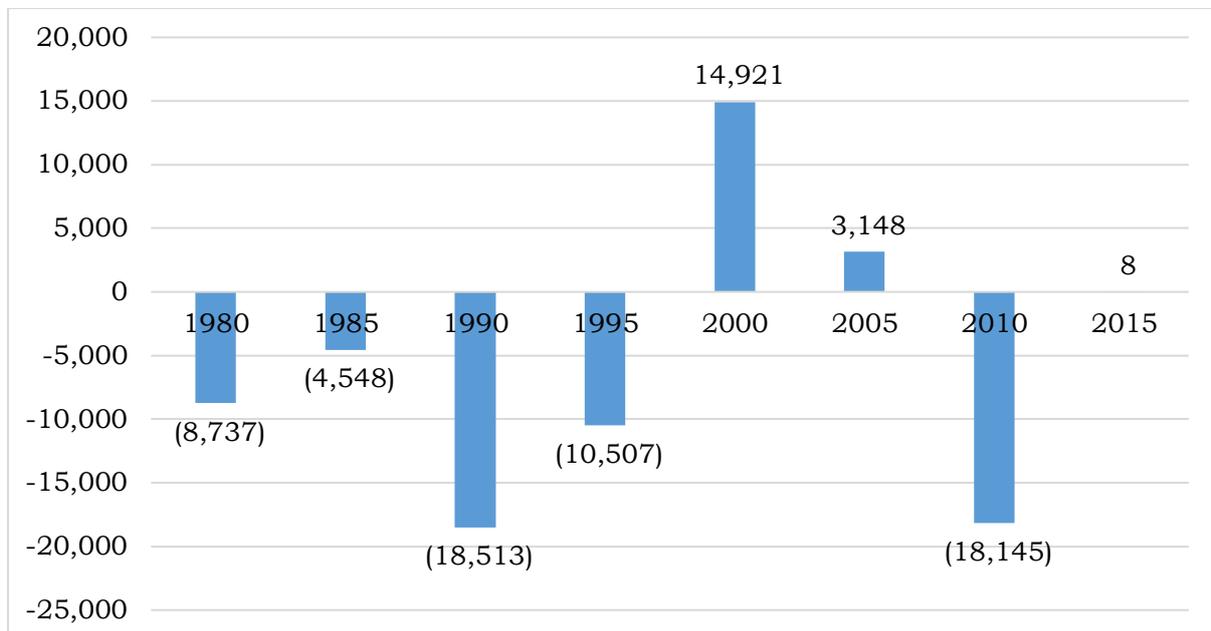
Letak geografis yang sulit serta terbatasnya sarana pembangunan telah membuat Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi bukan tujuan utama migrasi di Indonesia. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan bahwa hanya empat persen dari penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tempat lahirnya bukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (migran seumur hidup) (BPS 2015). Angka ini secara nasional sebesar 11,8%, paling rendah di Jawa Timur (2,5%) dan paling tinggi di Kepulauan Riau (47,7%). Sebagian besar migran seumur hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur lahir di luar negeri (40,9%), diikuti dengan di Jawa Timur (14,7%), Sulawesi Selatan (10,4%), dan Jawa Tengah (6,9%). Migran seumur hidup yang berasal dari luar negeri kemungkinan adalah mereka yang lahir di Timor-Leste.

Hasil SUPAS 2015 juga menunjukkan bahwa hanya 1,2% dari penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tempat tinggalnya lima tahun yang lalu bukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (migran risen). Angka ini secara nasional sebesar 2,5%, paling rendah di Jawa Timur (0,7%) dan paling tinggi di Kepulauan Riau (14,2%). Sebagian besar migran risen di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun

2005 bertempat tinggal di Bali (11,5%), diikuti dengan di Sulawesi Selatan (10%), Jawa Timur (9,4%), dan Kalimantan Timur (8,3%).

Selama periode 1980-2015 Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung mengalami migrasi risen neto negatif (penduduk yang meninggalkan Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih banyak daripada penduduk yang datang ke Provinsi Nusa Tenggara Timur), kecuali pada tahun 2000, 2005, dan 2015 (Gambar 2.6). Migrasi risen neto negatif ini dapat disebabkan karena penduduk mencari sarana pendidikan dan kesempatan kerja di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, migrasi risen neto positif (penduduk yang datang ke Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih banyak daripada penduduk yang meninggalkan Provinsi Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2000 dan 2005 dapat disebabkan karena besarnya arus penduduk Timor-Leste yang datang ke Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia setelah Timor-Leste memperoleh kemerdekaannya.

Gambar 2.6
Migrasi risen neto: Nusa Tenggara Timur 1980-2015

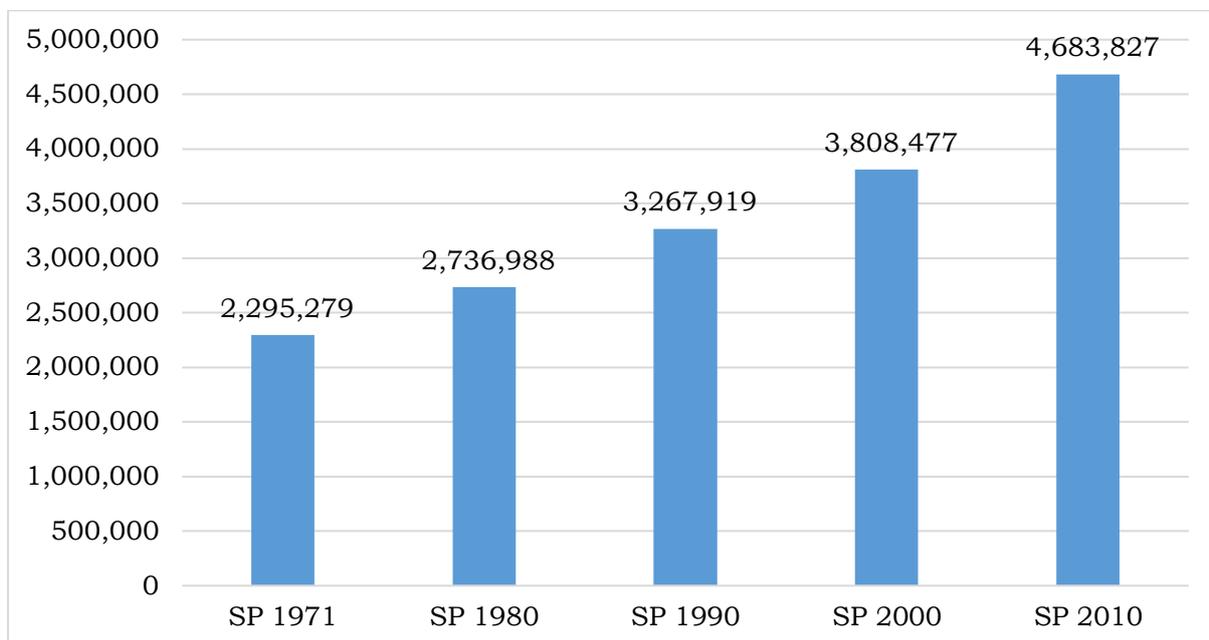


Sumber: www.bps.go.id (diolah).

Proses demografis mempengaruhi keluaran demografis di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat dari 2,3 juta

jiwa pada tahun 1971 menjadi 4,7 juta jiwa pada tahun 2010 (Gambar 2.7). Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur turun dari 2,31% per tahun pada periode 1971-1980 menjadi 1,64% per tahun pada periode 1990-2000 dan kemudian meningkat menjadi 2,07% per tahun pada periode 2000-2010 (Gambar 2.8). Peningkatan pertumbuhan penduduk ini dapat disebabkan karena peningkatan fertilitas dan migrasi masuk penduduk Timor-Leste pada periode 2000-2010.

Gambar 2.7
Jumlah penduduk: Nusa Tenggara Timur 1971-2010

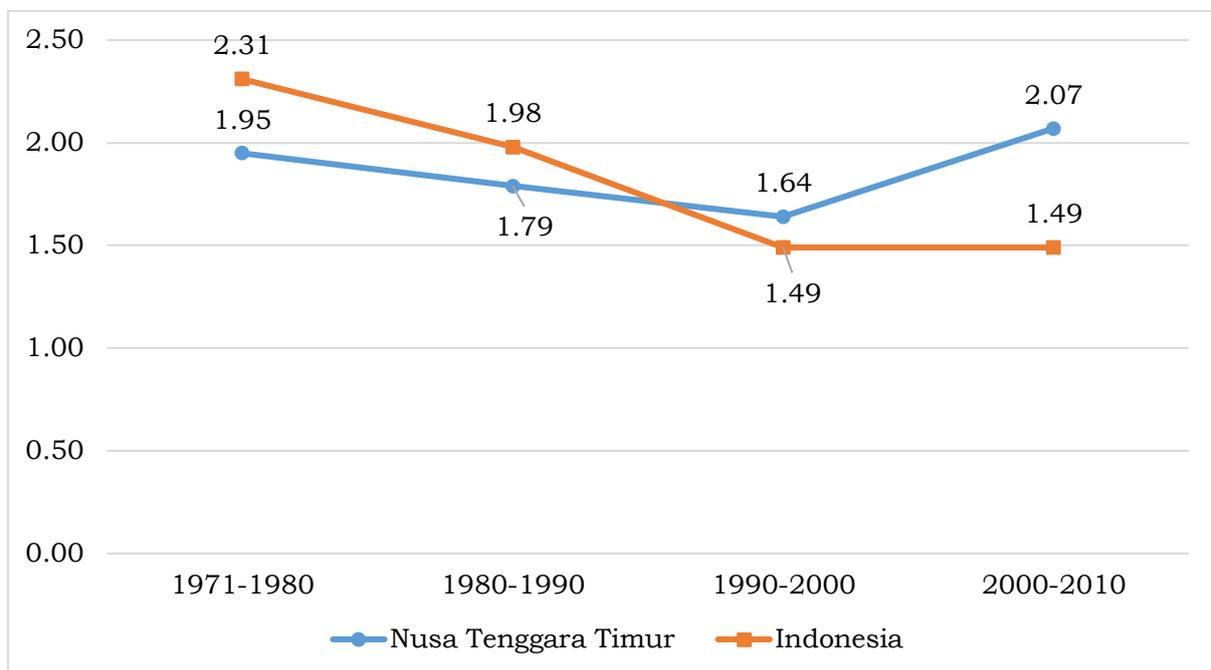


Sumber: www.bps.go.id (diolah).

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk pada periode 1971-1980 waktu penggandaan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 36 tahun dan meningkat menjadi 43 tahun berdasarkan laju pertumbuhan penduduk pada periode 1990-2000 dan kemudian menurun menjadi 34 tahun berdasarkan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010. Jika Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mengalami migrasi masuk penduduk dari Timor-Leste pada periode 2000-2010, terdapat kemungkinan tingkat kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur menurun. Jika tidak ada migrasi masuk penduduk dari Timor-Leste dan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Nusa

Tenggara Timur menurun menjadi 1,55% pada periode 2000-2010, maka penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur akan berjumlah sekitar 4,4 juta jiwa pada tahun 2010. Jadi, migran Timor-Leste yang memasuki Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih bertahan hidup pada tahun 2010 diperkirakan antara 200 ribu dan 300 ribu jiwa.

Gambar 2.8
Angka pertumbuhan penduduk: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia
1971-2010 (persen per tahun)



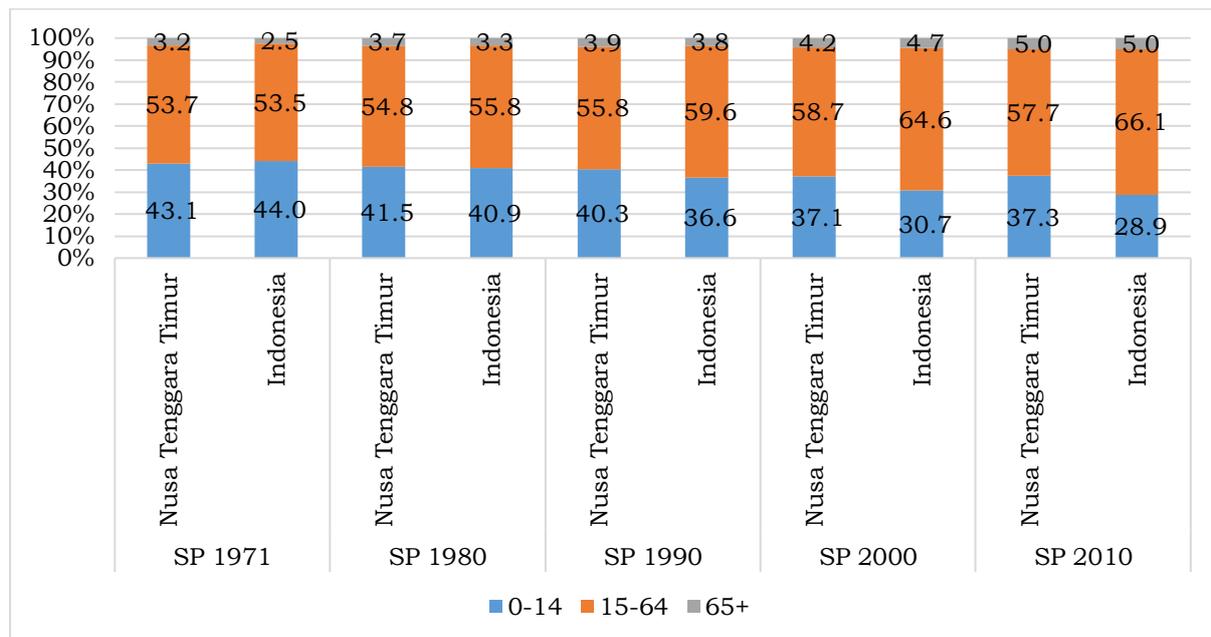
Sumber: www.bps.go.id (diolah).

Struktur umur penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur muda hingga tahun 1990 dimana penduduk usia muda (0-14 tahun) lebih dari 40% dan antara muda dan tua (*intermediate*) pada tahun 2000 dan 2010 dimana penduduk usia muda sudah kurang dari 40% (Gambar 2.9). Persentase penduduk usia muda Provinsi Nusa Tenggara Timur menurun menjadi 37,1% pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 37,3% pada tahun 2010. Sementara itu, penduduk usia produktif (15-64 tahun) meningkat dari 53,7% pada tahun 1971 menjadi 58,7% pada tahun 2000 dan menurun menjadi 57,7% pada tahun 2010 dan penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) meningkat secara perlahan dari 3,2% pada tahun 1971 menjadi 5,0% pada tahun 2010. Peningkatan persentase penduduk usia muda dapat

disebabkan karena adanya peningkatan fertilitas dan karena migrasi masuk penduduk usia muda dari Timor-Leste. Penurunan persentase penduduk usia produktif dapat disebabkan karena migrasi neto negatif penduduk usia produktif.

Gambar 2.9

Distribusi umur penduduk usia 0-14 tahun, 15-64 tahun, dan 65 tahun ke atas: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 1971-2010

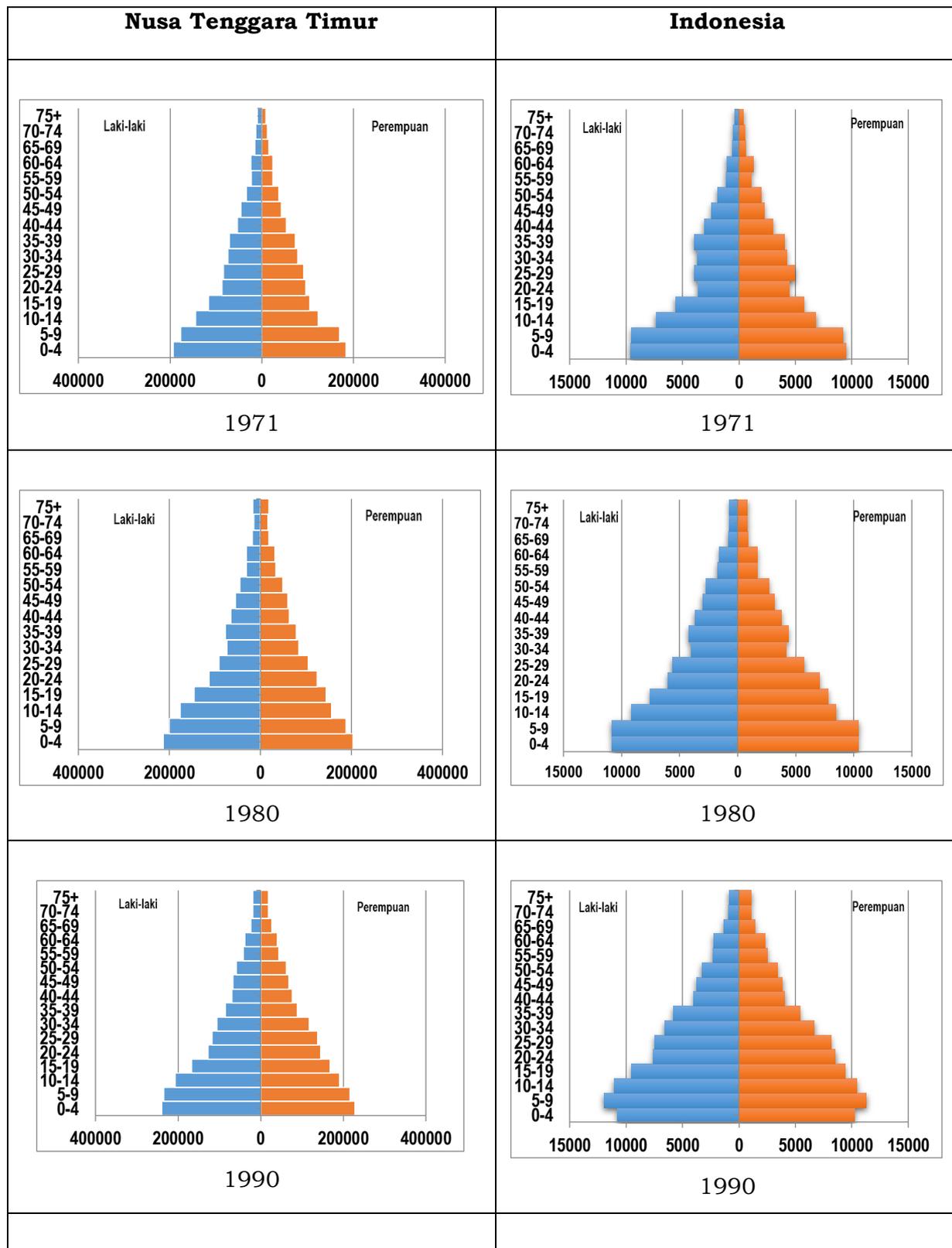


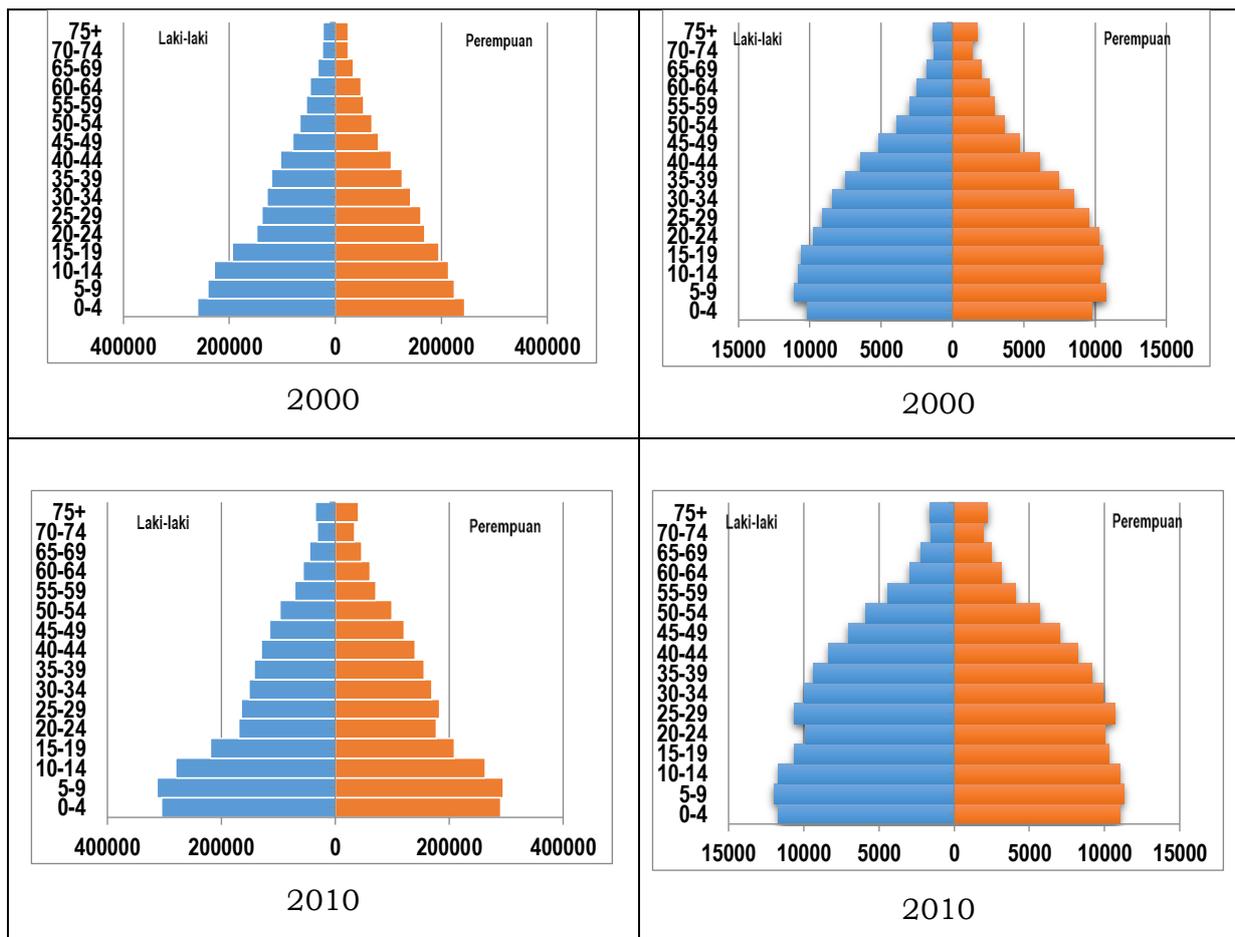
Sumber: BPS (1974a, 1974b, 1983a, 1983b, 19921, 1992b, 2001a dan 2001b); www.bps.go.id (diolah).

Proses demografis yang terjadi selama periode 1971-2010, khususnya migrasi neto negatif penduduk usia produktif dan migrasi masuk penduduk Timor-Leste, mengakibatkan piramida penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap ekspansif (dasar piramida paling lebar) hingga tahun 2010 (Gambar 2.10). Sementara itu, piramida penduduk Indonesia sudah mulai konstiktif (lebar dasar piramida berkurang) sejak tahun 1990 karena tingkat kelahiran dan kematian yang terus turun. Hasil proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 (Bappenas dkk 2013) menunjukkan bahwa piramida penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur akan tetap ekspansif hingga tahun 2035 karena tingkat fertilitas dan mortalitas yang relatif masih tinggi dan migrasi neto negatif.

Gambar 2.10

Piramida Penduduk: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 1971-2010





Sumber: BPS (1974a, 1974b, 1983a, 1983b, 19921, 1992b, 2001a dan 2001b); www.bps.go.id (diolah).

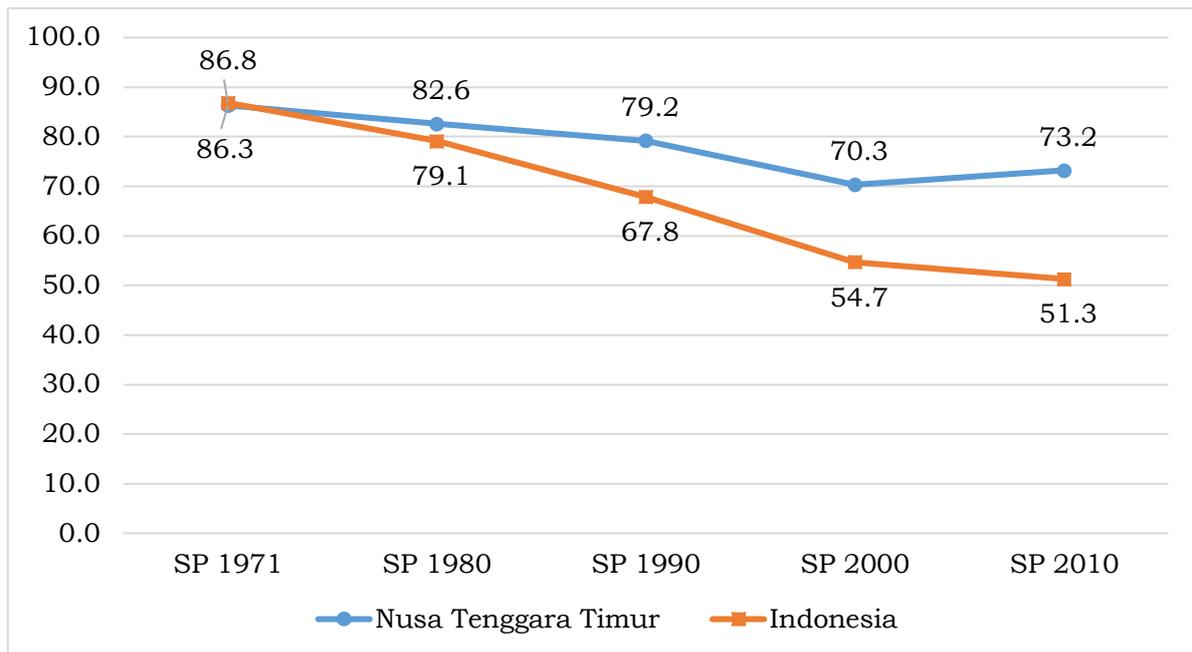
Berdasarkan struktur umur penduduk maka rasio ketergantungan umur (RKU) Provinsi Nusa Tenggara Timur turun dari 86,3 pada tahun 1971 menjadi 70,3 pada tahun 2000 dan kemudian meningkat menjadi 73,2 pada tahun 2010 (Gambar 2.11). RKU Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih rendah daripada RKU Indonesia pada tahun 1971. Akan tetapi, sejak tahun 1980, RKU Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih tinggi daripada RKU Indonesia, dengan perbedaan yang semakin meningkat, 3,5 poin pada tahun 1980 dan 21,9 poin pada tahun 2010.

Pada masa lalu penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi oleh penduduk laki-laki. Pada tahun 1971 terdapat 102 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Gambar 2.11). Sementara itu, secara nasional terdapat lebih banyak penduduk perempuan daripada penduduk laki-laki (97 laki-laki per 100 perempuan), yang dapat disebabkan karena banyak laki-laki yang meninggal pada saat perang kemerdekaan. Akan

tetapi, rasio jenis kelamin (RJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian menurun, yang dapat disebabkan karena migrasi keluar penduduk laki-laki, menjadi 98,7 pada tahun 2010. Sementara itu, RJK Indonesia terus meningkat menjadi 101,4 pada tahun 2010, yang dapat mengindikasikan perbaikan derajat kesehatan laki-laki di Indonesia.

Gambar 2.11

**Rasio Ketergantungan Umur: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 1971-2010
(penduduk usia tidak produktif per 100 penduduk usia produktif)**

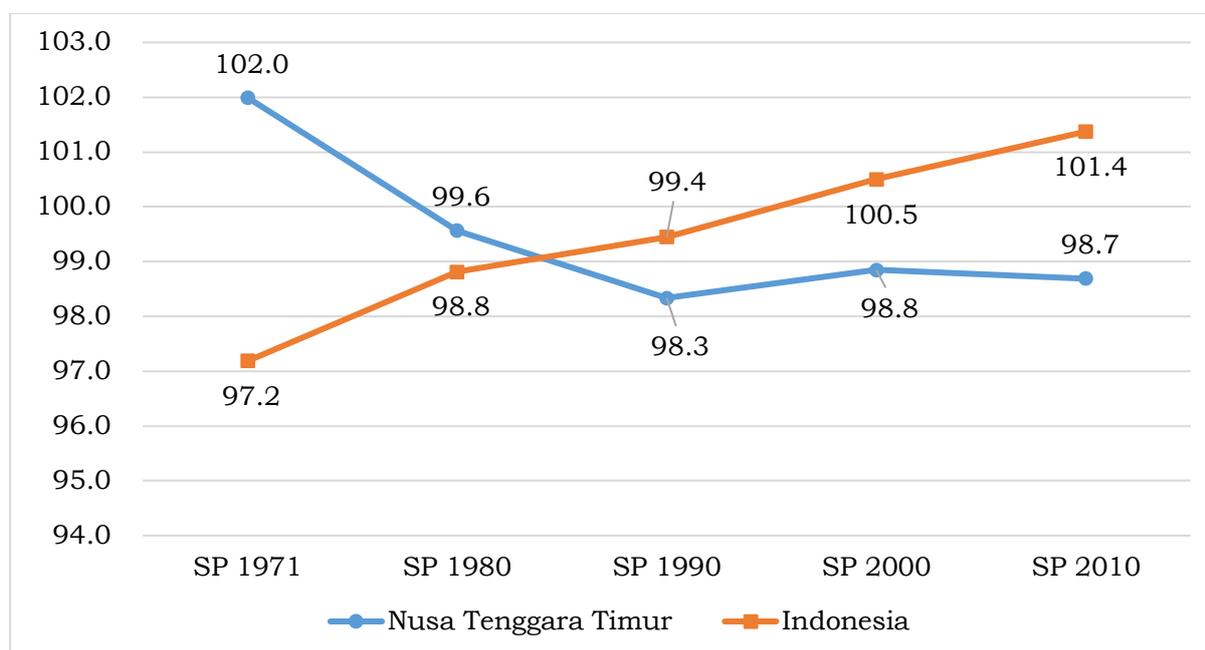


Sumber: BPS (1974a, 1974b, 1983a, 1983b, 19921, 1992b, 2001a dan 2001b); www.bps.go.id (diolah).

Pada tahun 1971 hanya enam dari 100 penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tinggal di wilayah perkotaan, sementara angka ini sekitar 17% untuk Indonesia (Gambar 2.13). Kemajuan pembangunan telah mengakibatkan peningkatan wilayah perkotaan dan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan melalui pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan, migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan, dan reklasifikasi wilayah perdesaan menjadi wilayah perkotaan. Pada tahun 2010, penduduk perkotaan meningkat menjadi 24% di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 49,8% di Indonesia. Secara absolut, jumlah penduduk perkotaan Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat tujuh kali lebih banyak, sementara penduduk perkotaan Indonesia meningkat 5,8 kali lebih banyak.

Gambar 2.12

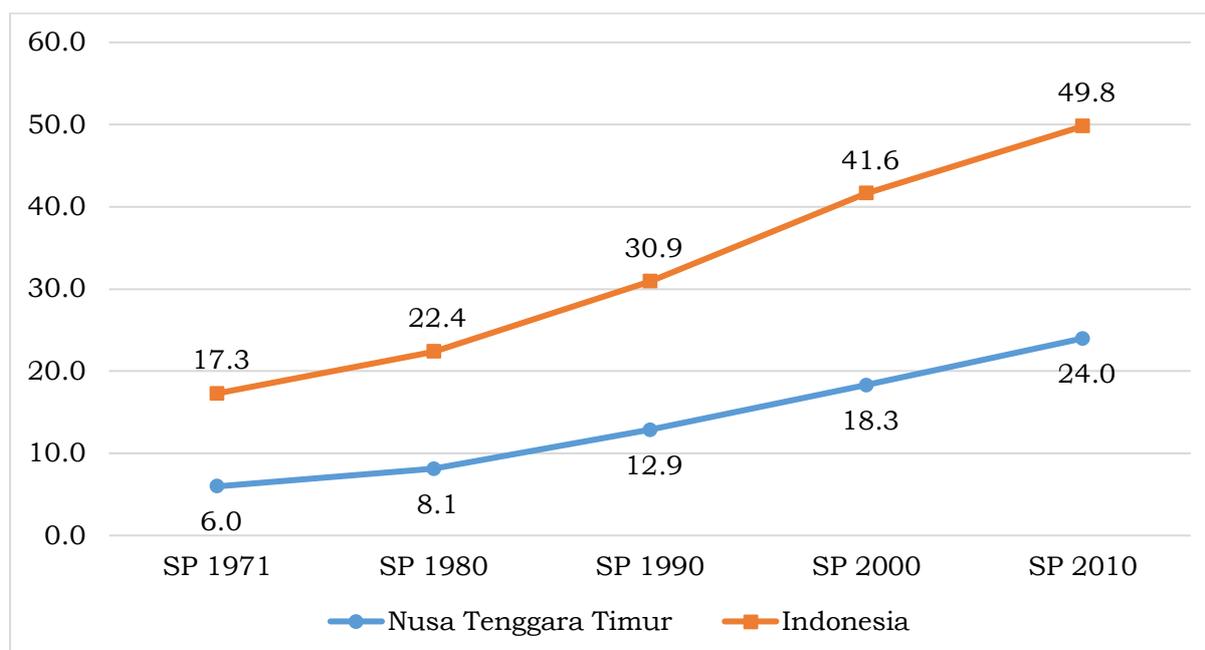
**Rasio jenis kelamin: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 1971-2010
(laki-laki per 100 perempuan)**



Sumber: BPS (1974a, 1974b, 1983a, 1983b, 19921, 1992b, 2001a dan 2001b); www.bps.go.id (diolah).

Gambar 2.13

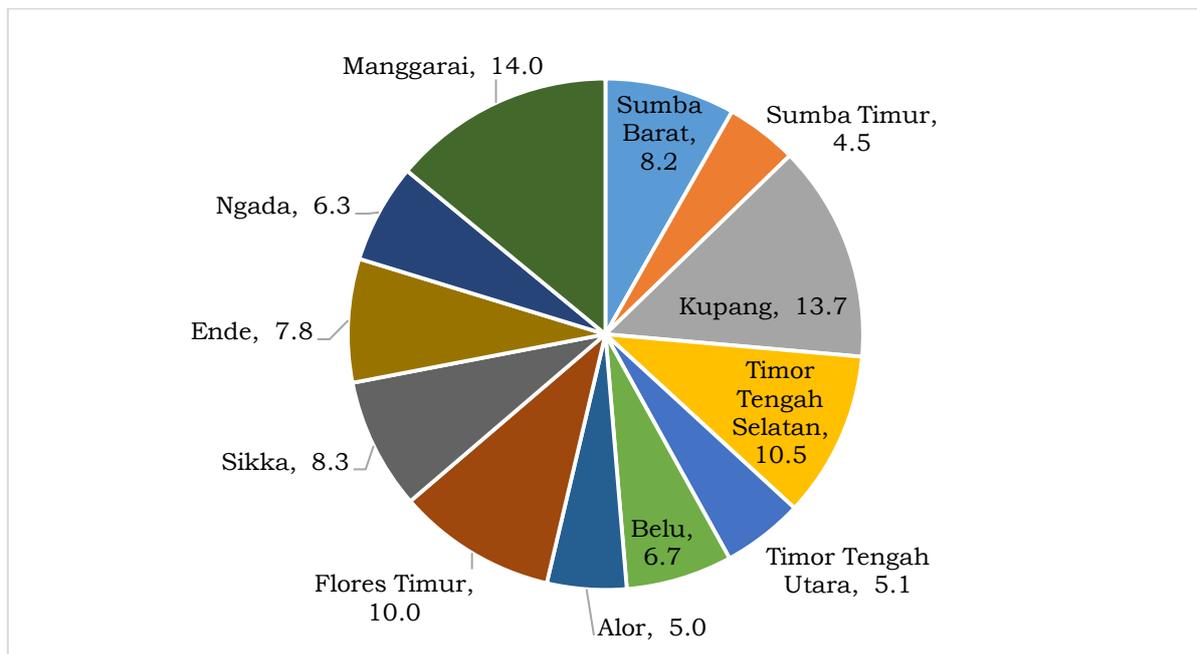
**Persentase penduduk perkotaan: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia
1971-2010**



Sumber: BPS (1974a, 1974b, 1983a, 1983b, 19921, 1992b, 2001a dan 2001b); www.bps.go.id (diolah).

Secara administratif, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami perubahan yang signifikan selama periode 1971-2010. Jika pada tahun 1971 hanya ada 12 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka pada tahun 2010 ada 20 kabupaten dan satu kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti dapat dilihat pada Gambar 2.14, pada tahun 1971, penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur paling sedikit di Kabupaten Sumba Timur (4,5%) dan paling banyak di Kabupaten Manggarai (14%). Posisi Pulau Sumba yang secara geografis sulit dijangkau mungkin telah menyebabkan penduduk paling sedikit di Kabupaten Sumba Timur yang terletak di Pulau Sumba. Sementara itu, Kabupaten Manggarai yang terletak di Pulau Flores mungkin merupakan salah satu kabupaten yang relatif paling maju di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 1971 sehingga penduduk paling banyak di Kabupaten Manggarai.

Gambar 2.14
Distribusi persentase penduduk menurut kabupaten/kotamadya:
Nusa Tenggara Timur 1971

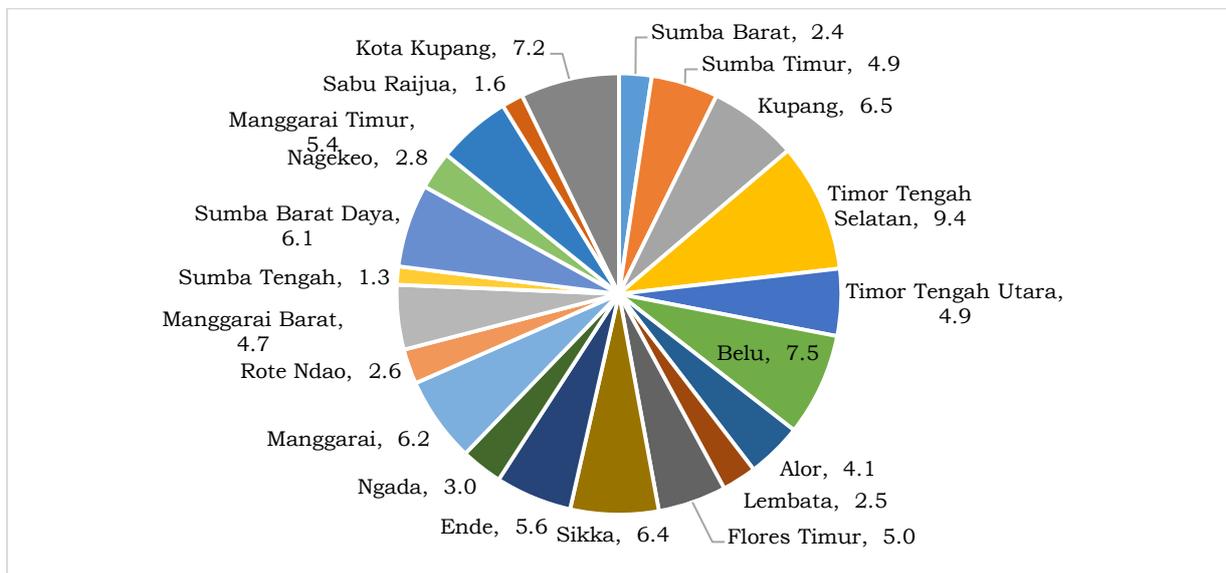


Sumber: BPS (1974a) (diolah).

Pada tahun 2010, seperti dapat dilihat pada Gambar 2.15, penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur paling sedikit di Kabupaten Sumba Tengah (1,3%) dan paling banyak di Kabupaten Timor Tengah Selatan (9,4%). Seperti halnya Kabupaten

Sumba Timur, posisi Pulau Sumba yang secara geografis sulit dijangkau mungkin telah menyebabkan penduduk paling sedikit di Kabupaten Sumba Tengah yang terletak di Pulau Sumba. Paling banyaknya penduduk di Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat disebabkan karena pemekaran kabupaten Manggarai yang penduduknya paling banyak pada tahun 2000, menjadi Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Manggarai Barat.

Gambar 2.15
Distribusi persentase penduduk menurut kabupaten/kota:
Nusa Tenggara Timur 2010

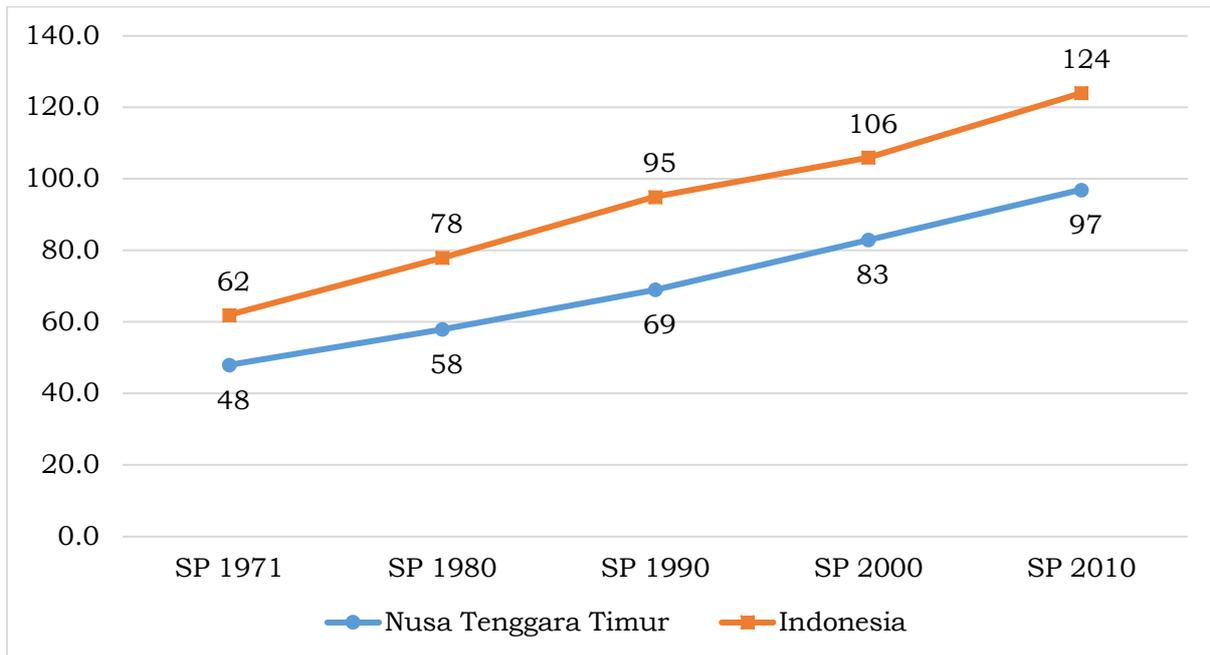


Sumber: sp2010.bps.go.id (diolah).

Proses demografis telah mengakibatkan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih padat lebih dari dua kali lipat dari 62 penduduk per km² pada tahun 1971 menjadi 124 penduduk per km² pada tahun 2010 (Gambar 2.16). Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi ke-15 paling padat di Indonesia, namun secara konsisten kepadatan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih rendah daripada kepadatan penduduk Indonesia. Kepadatan penduduk bervariasi secara nyata antarkabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2010 penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur paling jarang di Kabupaten Sumba Timur (33 penduduk per km²) dan paling padat di ibu kota provinsi, Kota Kupang (12.843 penduduk per km²).

Gambar 2.16

Kepadatan penduduk: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 1971-2010



Sumber: BPS (1974a, 1974b, 1983a, 1983b, 19921, 1992b, 2001a dan 2001b); www.bps.go.id (diolah).

2.2. Situasi Keluarga Berencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program keluarga berencana (KB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur baru dimulai pada masa Orde Baru pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) III (1979-1984). Jumlah penduduk yang relatif sedikit, kurang dari dua persen dari penduduk Indonesia, merupakan salah satu alasan program KB baru dilaksanakan pada Repelita III di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur dikelompokkan dalam wilayah Luar Jawa dan Bali II dalam hal implementasi program KB nasional, bersama 10 provinsi lainnya (Riau, Jambi, Bengkulu, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya). Program KB nasional dilaksanakan pertama kali pada Repelita I (1969-1974) di enam provinsi di Jawa dan Bali (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali). Pada Repelita II (1974-1979) program KB nasional diperluas ke 10 provinsi di wilayah Luar Jawa dan Bali I (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan).

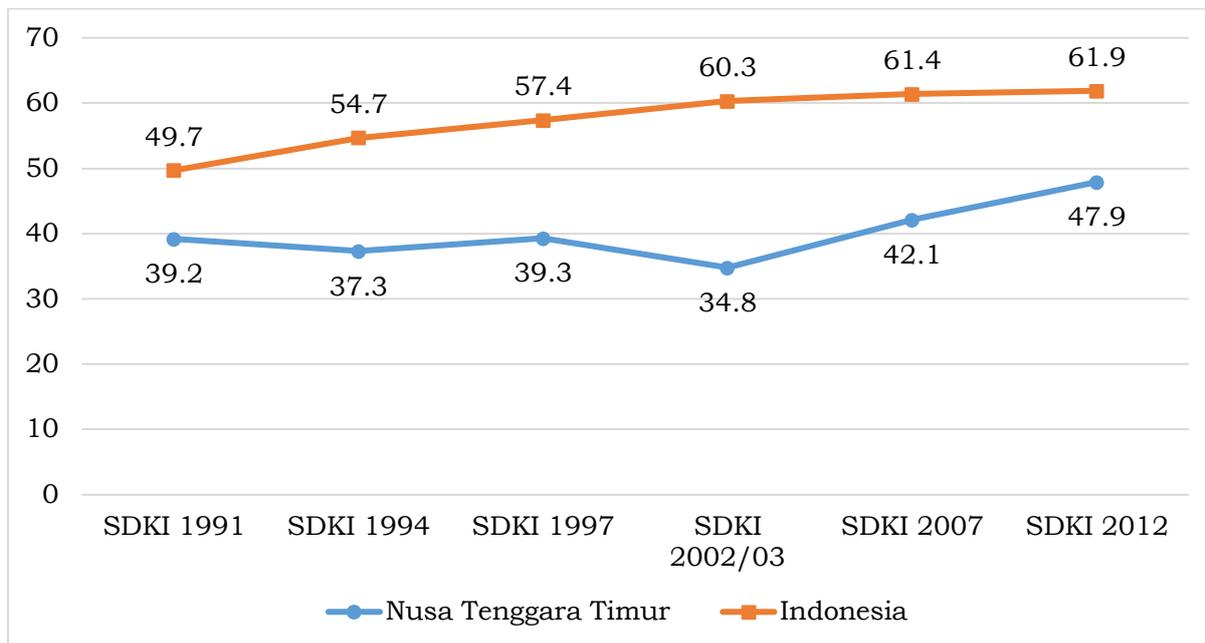
Pencapaian program KB nasional relatif lambat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal pengetahuan keluarga berencana, hasil SDKI 2012 (BPS dkk 2013) menunjukkan bahwa persentase perempuan usia 15-49 tahun yang mengetahui paling sedikit satu alat/cara KB di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih rendah daripada persentase perempuan usia 15-49 tahun yang mengetahui paling sedikit satu alat/cara KB nasional (94,7% versus 8%). Selanjutnya, persentase perempuan kawin usia 15-49 tahun yang tidak terpapar terhadap pesan KB melalui media massa (radio, televisi, koran/majalah, poster, atau pamflet) lebih tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur daripada di Indonesia (50,3% versus 45,8%).

Dalam hal pemakaian kontrasepsi, hasil SDKI 1991 – SDKI 2012 menunjukkan bahwa pemakaian kontrasepsi di kalangan perempuan kawin usia 15-49 tahun berfluktuasi dan cenderung meningkat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Gambar 2.17). Pada tahun 1991, 39% dari perempuan kawin usia 15-49 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur ber-KB. Angka ini meningkat menjadi 48% pada tahun 2012. Akan tetapi, pemakaian kontrasepsi di kalangan perempuan kawin usia 15-49 tahun lebih rendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur daripada di Indonesia. Pada tahun 1991 pasangan usia subur (PUS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,5 kali kurang cenderung ber-KB daripada PUS Indonesia secara keseluruhan. Angka ini meningkat menjadi 1,8 kali pada tahun 2012. Artinya, kesenjangan ber-KB di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Indonesia semakin besar.

Seperti halnya di Indonesia secara keseluruhan, hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan kawin usia 15-49 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan metode KB jangka pendek, terutama suntik KB (41,7%), diikuti dengan suatu cara tradisional (20%), terutama pantang berkala dan sanggama terputus (Gambar 2.18). Akan tetapi, perempuan kawin usia 15-49 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih cenderung memakai metode KB jangka panjang daripada perempuan Indonesia secara keseluruhan: 1,9 kali lebih cenderung disterilisasi KB, 1,5 kali lebih cenderung menggunakan IUD, dan 1,8 kali lebih cenderung menggunakan susuk KB.

Gambar 2.17

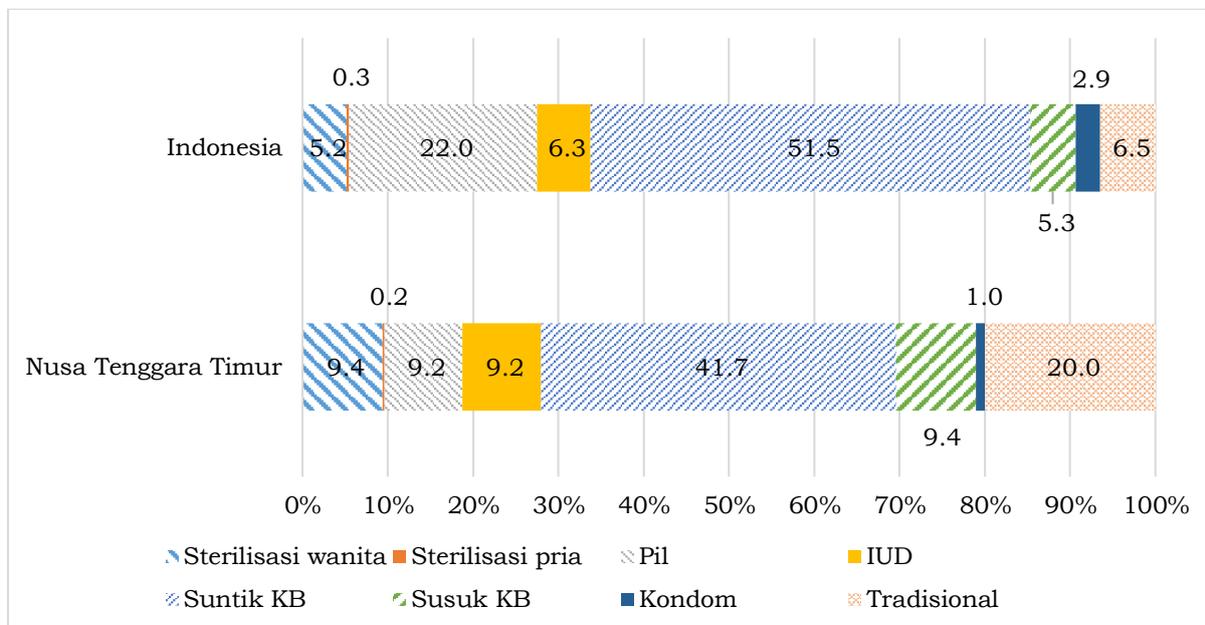
Angka prevalensi kontrasepsi: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 1991-2012



Sumber: BPS dkk (1992, 1995, 1998, 2003, 2008, dan 2013) (diolah).

Gambar 2.18

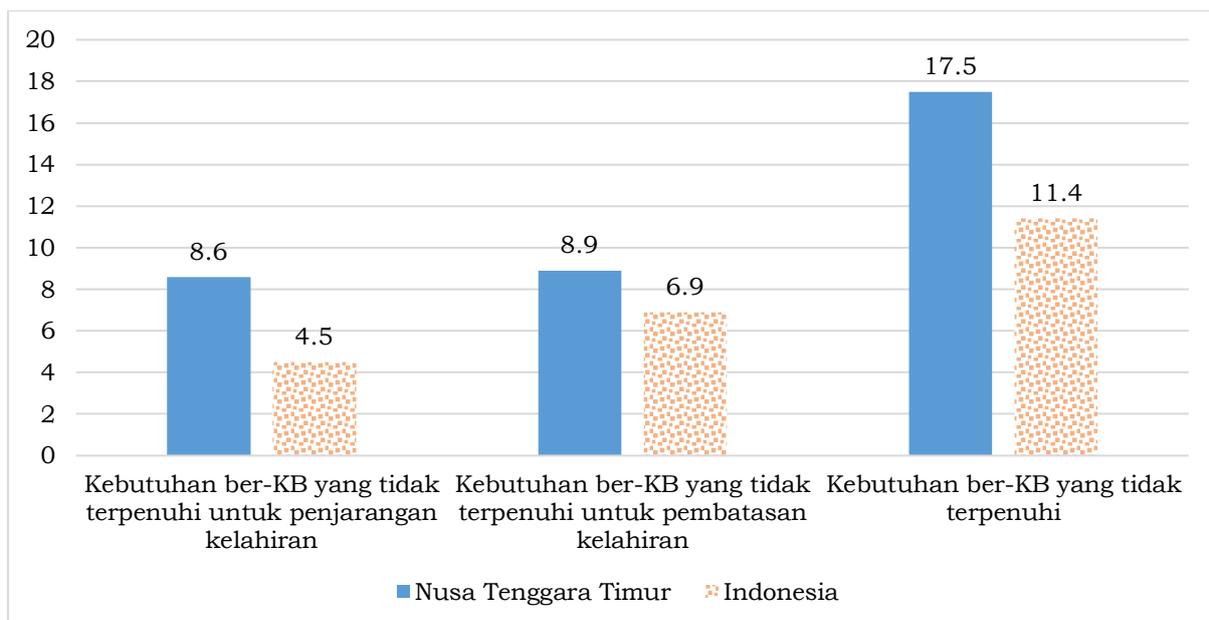
Distribusi persentase pemakai kontrasepsi menurut metode kontrasepsi: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 2012



Sumber: BPS dkk (2013) (diolah).

Hasil SDKI 2012 juga menunjukkan bahwa kebutuhan KB yang tidak terpenuhi di kalangan perempuan kawin usia 15-49 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur tinggi, lebih tinggi daripada kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi di Indonesia (Gambar 2.19), dan nomor lima paling tinggi di Indonesia setelah di Papua, Papua Barat, Maluku, dan Sulawesi Tenggara. Perempuan kawin usia 15-49 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur dua kali kurang cenderung untuk terpenuhi kebutuhan ber-KB untuk penjarangan kelahirannya, 1,3 kali kurang cenderung untuk terpenuhi kebutuhan ber-KB untuk pembatasan kelahirannya, dan 1,6 kali kurang cenderung untuk terpenuhi kebutuhan ber-KBnya daripada perempuan kawin usia 15-49 tahun secara keseluruhan.

Gambar 2.19
Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi:
Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 2012



Sumber: BPS dkk (2013) (diolah).

2.3. Permasalahan Kependudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya maka permasalahan kependudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikelompokkan menjadi permasalahan keluaran pembangunan, permasalahan proses demografis, dan permasalahan keluaran demografis. Dalam hal keluaran pembangunan, permasalahan yang

dihadapi oleh penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah akses terhadap pendidikan, kesehatan, lingkungan yang sehat, sanitasi layak, sumber air minum bersih dan sumber energi yang rendah, bahkan dalam kasus tertentu jauh lebih rendah, dibandingkan penduduk Indonesia secara keseluruhan, serta tingkat kemiskinan yang tinggi, yang telah menyebabkan rendahnya pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam hal proses demografis, permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah tingkat kelahiran dan kematian yang relatif tinggi, migrasi neto negatif penduduk usia produktif serta migrasi masuk penduduk dari luar negeri. Dalam hal keluaran demografis, permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pertumbuhan penduduk tinggi, rasio ketergantungan umur tinggi, lebih banyak penduduk perempuan, peningkatan penduduk perkotaan, dan persebaran penduduk yang tidak merata.

2.4. Permasalahan Keluarga Berencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Permasalahan Keluarga Berencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah prevalensi kontrasepsi relatif rendah, dominasi pemakaian metode KB jangka pendek, dan tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi. Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melaporkan adanya masalah komplikasi berat dan kegagalan kontrasepsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB 3
SITUASI DAN PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

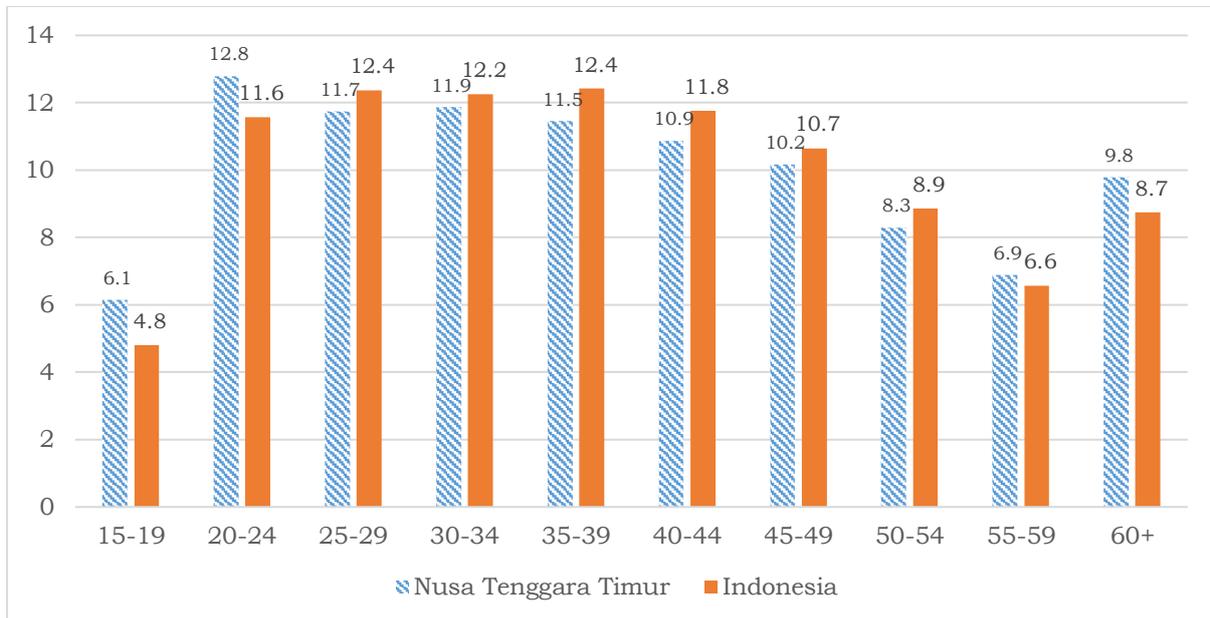
3.1. Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 5.203,5 ribu jiwa pada tahun 2016 (Bappenas dkk 2013). Dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2016 penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperkirakan sebesar 3.366.980 jiwa pada Februari 2016 (BPS 2016a). Penduduk usia kerja ini terdiri dari 72,6% atau 2.445.323 angkatan kerja (bekerja, pernah bekerja, dan tidak pernah bekerja) dan 27,4% atau 921.657 bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya). Dari angkatan kerja ini, 96,4% atau 2.357.624 bekerja dan 3,6% atau 87.699 pengangguran terbuka (23.574 pernah bekerja dan 64.125 tidak pernah bekerja).

Struktur umur angkatan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih muda dan lebih tua daripada struktur umur angkatan kerja Indonesia secara keseluruhan. Hasil SAKERNAS 2016 menunjukkan bahwa angkatan kerja berusia muda (15-24 tahun) dan berusia 60 tahun ke atas masing-masing 18,9% dan 9,8% di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sementara angka ini masing-masing 16,4% dan 8,7% untuk Indonesia (Gambar 3.1). Akibatnya, rasio antara jumlah angkatan kerja usia 15-24 tahun dan 60 tahun ke atas dengan jumlah angkatan kerja usia 25-64 tahun lebih tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dibandingkan dengan di Indonesia secara keseluruhan (40,3 versus 33,5). Struktur umur angkatan kerja ini dapat berimplikasi pada produktivitas angkatan kerja yang lebih rendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

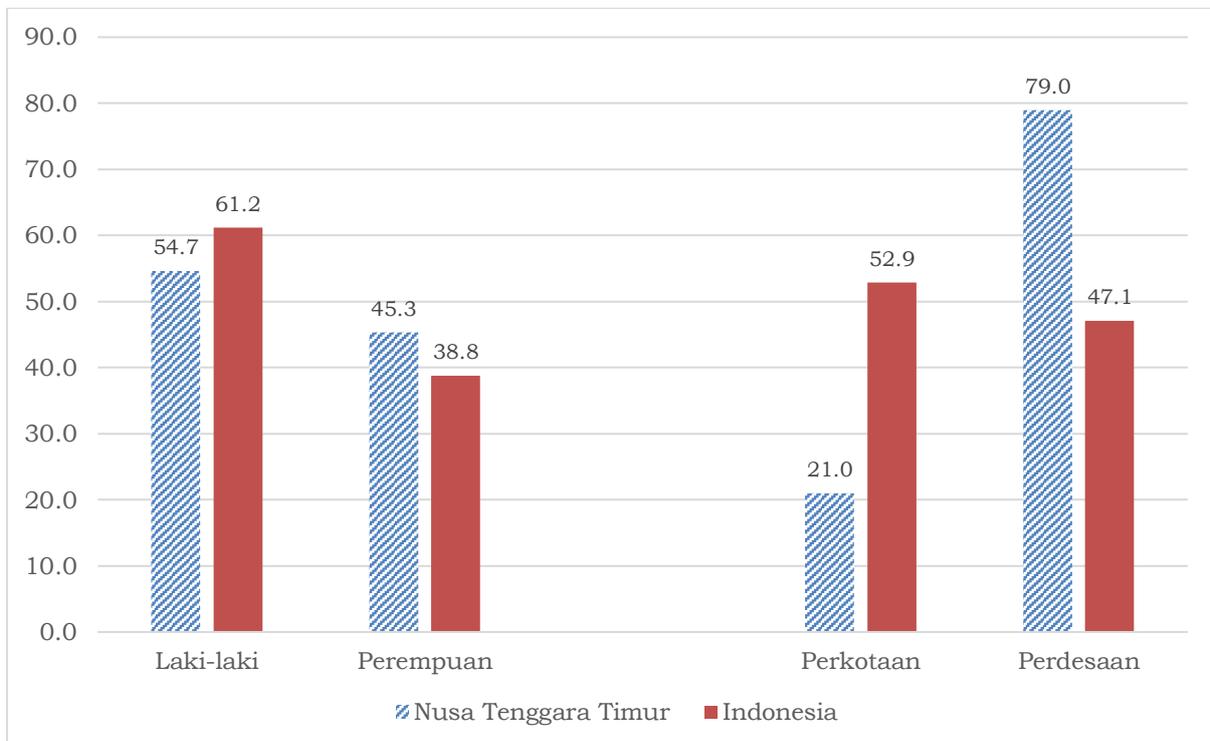
Hasil SAKERNAS 2016 juga menunjukkan bahwa angkatan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagian besar adalah laki-laki (54,7%) dan tinggal di perdesaan (79%) (Gambar 3.2). Angka ini masing-masing 61,2% dan 47,1% untuk Indonesia. Dominasi angkatan kerja perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan suatu potensi pertumbuhan ekonomi jika produktivitas sektor-sektor perekonomian perdesaan dioptimalkan.

Gambar 3.1
Distribusi persentase angkatan kerja menurut umur:
Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 2016



Sumber: BPS (2016a) (diolah).

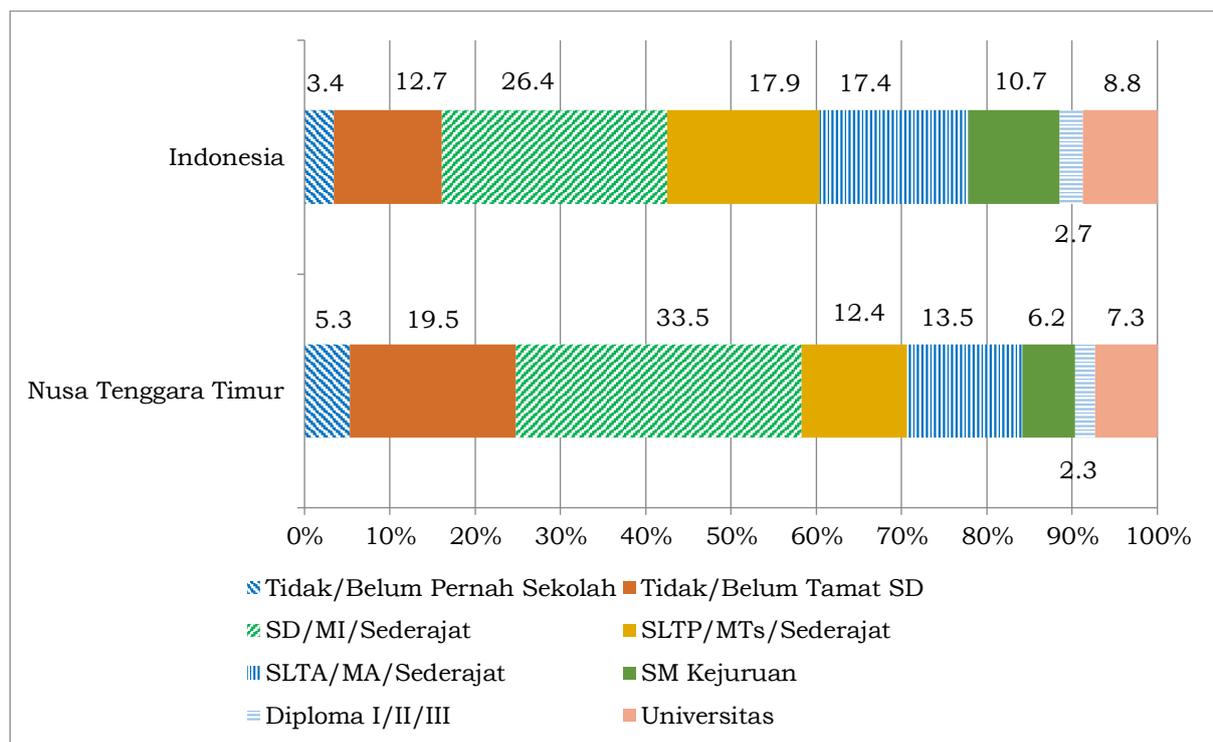
Gambar 3.2
Distribusi persentase angkatan kerja menurut jenis kelamin dan tempat tinggal:
Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 2016



Sumber: BPS (2016a) (diolah).

Angkatan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih cenderung berpendidikan rendah dibandingkan dengan angkatan kerja di Indonesia secara keseluruhan (Gambar 3.3). Hasil SAKERNAS 2016 menunjukkan bahwa angkatan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,9 kali lebih cenderung untuk berpendidikan rendah (sekolah dasar/SD atau lebih rendah), 1,8 kali kurang cenderung untuk berpendidikan menengah (sekolah menengah pertama/SMP atau sekolah menengah atas/SMA) dan 1,2 kali kurang cenderung untuk berpendidikan tinggi (diploma dan universitas) dibandingkan dengan angkatan kerja Indonesia secara keseluruhan.

Gambar 3.3
Distribusi persentase angkatan kerja menurut pendidikan:
Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 2016

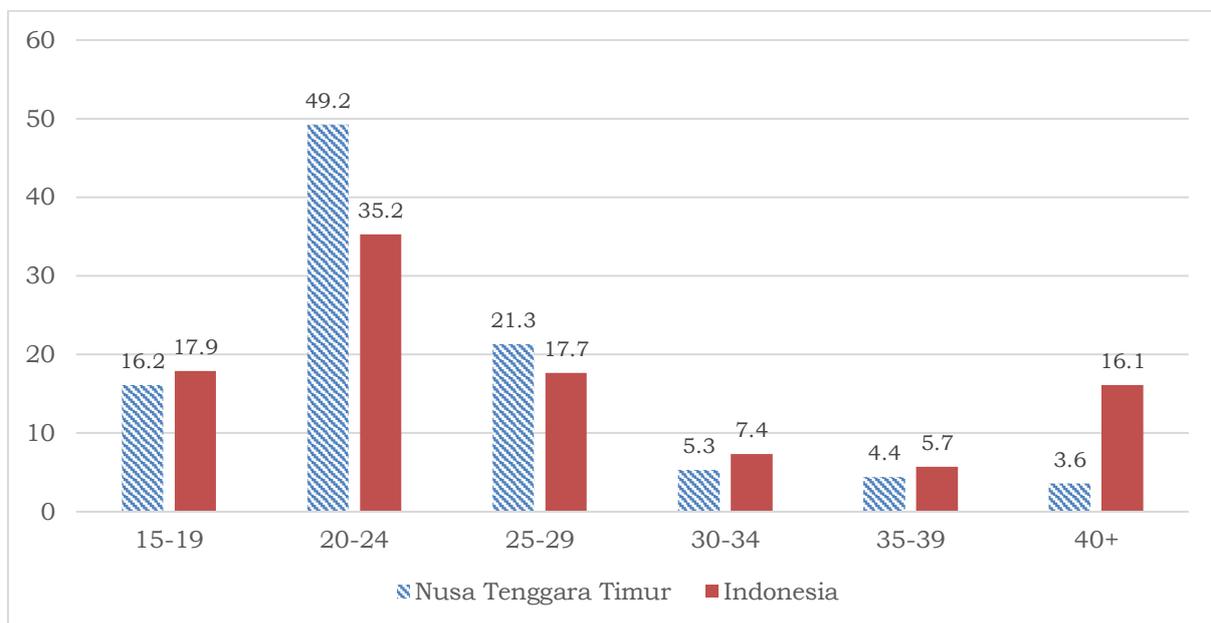


Sumber: BPS (2016a) (diolah).

Pengangguran terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur dicirikan oleh pencari kerja muda, laki-laki dan perdesaan (Gambar 3.4). Hasil SAKERNAS 2016 menunjukkan bahwa sebagian besar pencari kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur berusia 20-24 tahun (49%), diikuti dengan pencari kerja berusia 25-29

tahun (21%), dan pencari kerja berusia 15-19 tahun (16%). Pengangguran terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2,7 kali lebih cenderung untuk berusia 15-29 tahun daripada pengangguran terbuka Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, sebagian besar pencari kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah laki-laki (51,3%) dan tinggal di perdesaan (54,1%) (Gambar 3.5).

Gambar 3.4
Distribusi persentase pengangguran terbuka menurut umur:
Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 2016

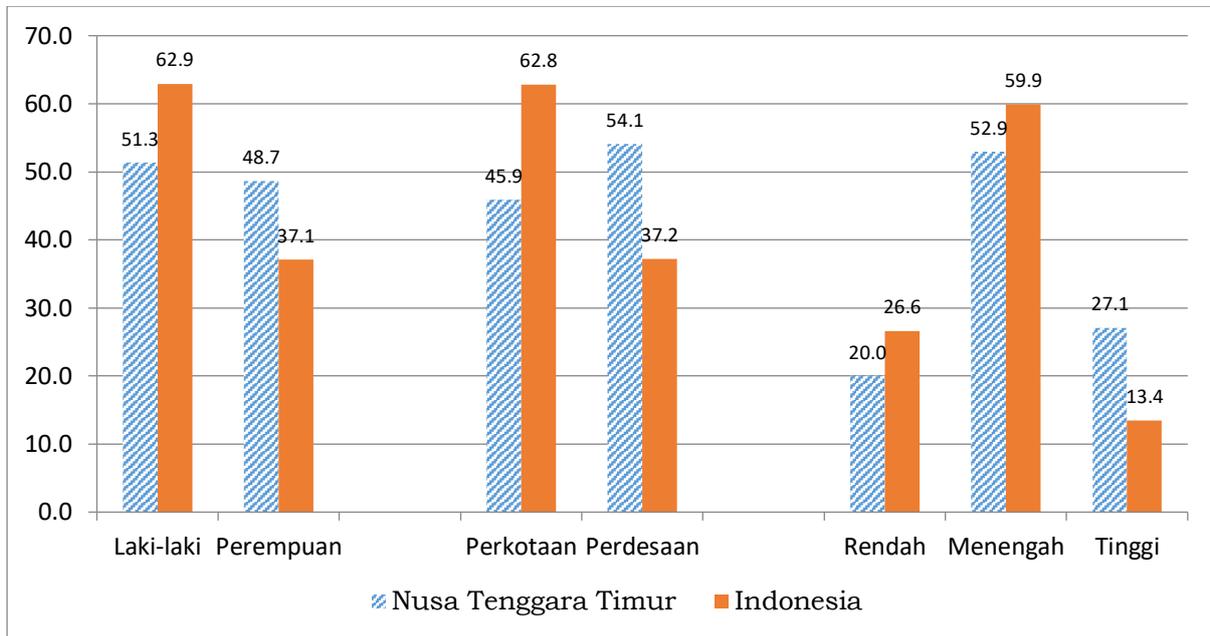


Sumber: BPS (2016a) (diolah).

Selanjutnya, lebih dari separuh (53%) pencari kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur berpendidikan menengah, 27% berpendidikan tinggi dan 20% berpendidikan rendah (Gambar 3.5). Pencari kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,5 kali kurang cenderung untuk berpendidikan rendah, 1,3 kali kurang cenderung untuk berpendidikan menengah dan 2,4 kali lebih cenderung untuk berpendidikan tinggi dibandingkan dengan pencari kerja di Indonesia secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan kebutuhan yang tinggi terhadap kesempatan kerja bagi angkatan kerja berpendidikan menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, hal ini juga menunjukkan adanya penawaran angkatan kerja berpendidikan tinggi yang secara nyata lebih tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dibandingkan dengan di Indonesia secara keseluruhan.

Gambar 3.5

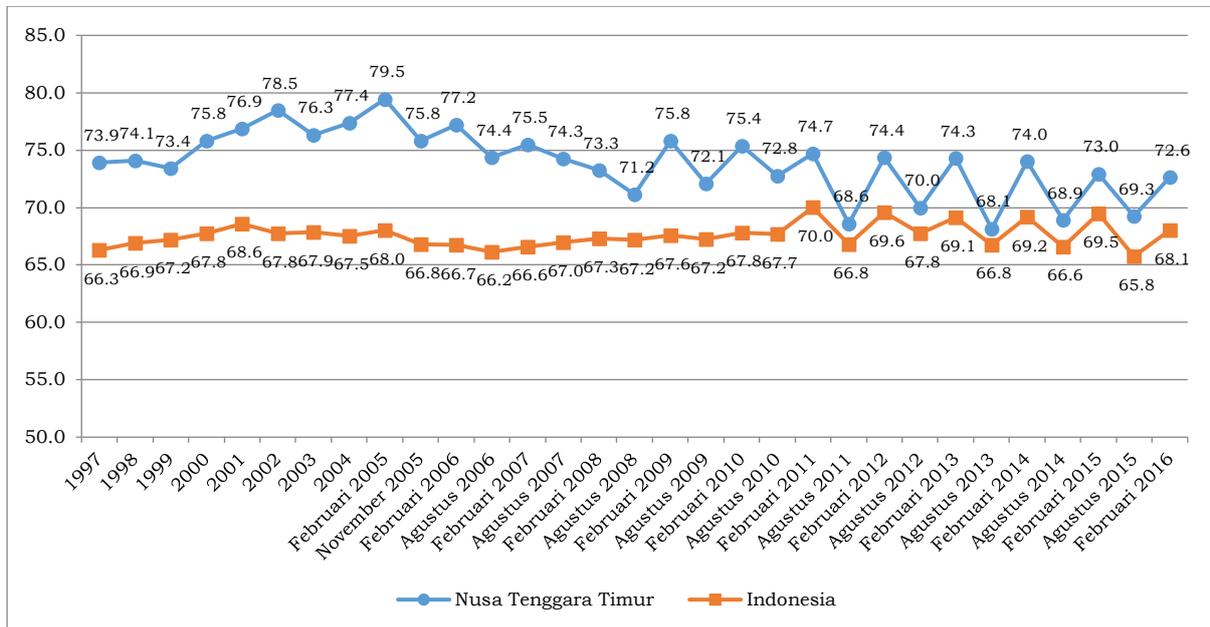
Distribusi persentase pengangguran terbuka menurut jenis kelamin, tempat tinggal dan pendidikan: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 2016



Sumber: BPS (2016a) (diolah).

Hasil SAKERNAS 1997-2016 menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur berfluktuasi dengan kecenderungan menurun (Gambar 3.6). Selain itu, partisipasi angkatan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara konsisten lebih tinggi daripada partisipasi angkatan kerja Indonesia secara keseluruhan. Fluktuasi dalam partisipasi angkatan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disebabkan karena adanya pengaruh musim (musim hujan pada bulan November sampai dengan bulan Maret dan musim kemarau pada bulan April sampai dengan bulan Oktober) dimana penduduk usia kerja lebih cenderung terjun ke dalam pasar kerja pada bulan Februari daripada pada bulan Agustus. Sementara itu, kecenderungan partisipasi angkatan kerja yang menurun di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disebabkan karena adanya kecenderungan peningkatan penduduk usia kerja yang menjadi bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya). Selanjutnya, lebih tingginya partisipasi angkatan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur daripada di Indonesia secara keseluruhan dapat disebabkan karena sebagian besar penduduk bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja di sektor pertanian yang cenderung lebih mudah untuk dimasuki.

Gambar 3.6
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia
1997-2016



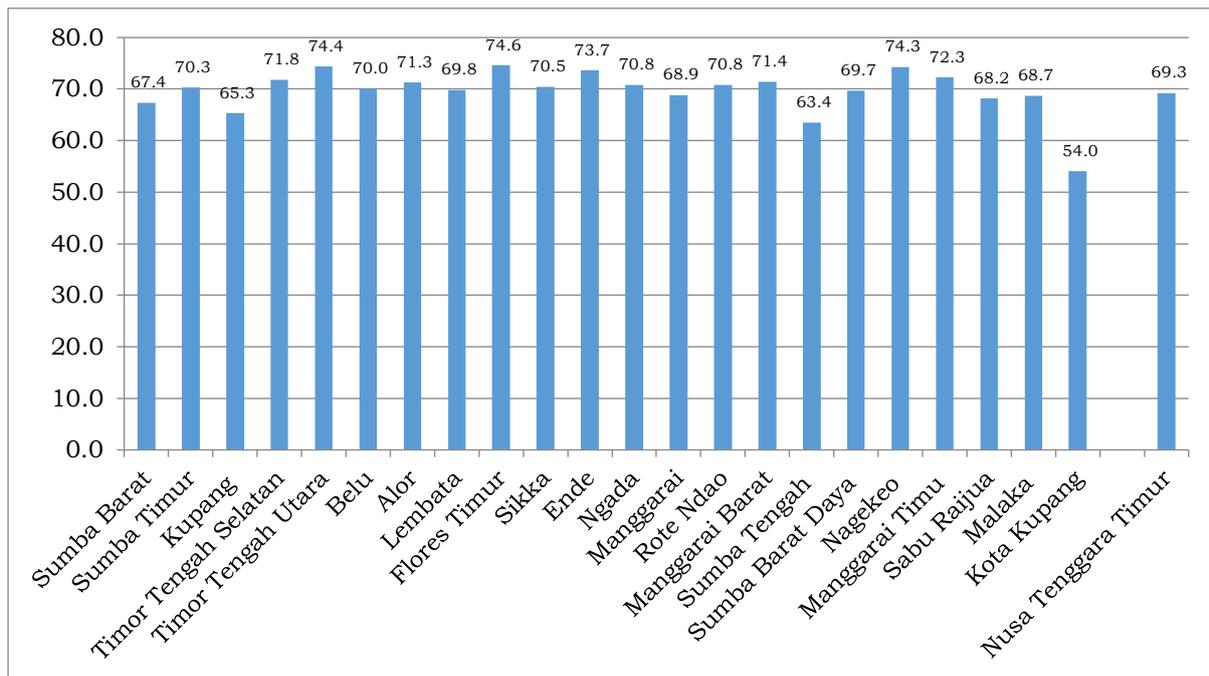
Sumber: www.bps.go.id (diolah).

Partisipasi angkatan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur bervariasi menurut kabupaten/kota. Hasil SAKERNAS 2015 menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja bervariasi antara 54% di Kota Kupang dan 74,6% di Kabupaten Flores Timur (Gambar 3.7). Hal ini dapat disebabkan karena kesempatan kerja yang tersedia di Kota Kupang didominasi oleh sektor jasa yang memerlukan kualifikasi angkatan kerja yang lebih tinggi sehingga lebih sulit untuk dimasuki. Sementara itu, di Kabupaten Flores Timur dan kabupaten-kabupaten lainnya, kesempatan kerja didominasi oleh sektor pertanian yang cenderung lebih mudah untuk dimasuki.

Menurut kelompok umur, hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa hanya 37% dari penduduk usia kerja 15-19 tahun yang berpartisipasi dalam pasar kerja (Gambar 3.8). TPAK meningkat seiring dengan meningkatnya umur, mencapai puncaknya pada kelompok umur 45-49 tahun (90,5%) dan kemudian menurun pada kelompok umur yang lebih tua menjadi 57,9% pada kelompok umur 65 tahun ke atas. Paling rendahnya TPAK pada kelompok umur 15-19 dapat disebabkan karena sebagian besar penduduk pada kelompok umur ini masih menempuh pendidikan. Sementara itu, TPAK yang lebih rendah pada kelompok

umur 65 tahun ke atas dapat disebabkan karena penduduk usia kerja sudah memasuki masa pensiun atau sudah tidak mampu lagi untuk bekerja.

Gambar 3.7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut kabupaten/kota:
Nusa Tenggara Timur 2015

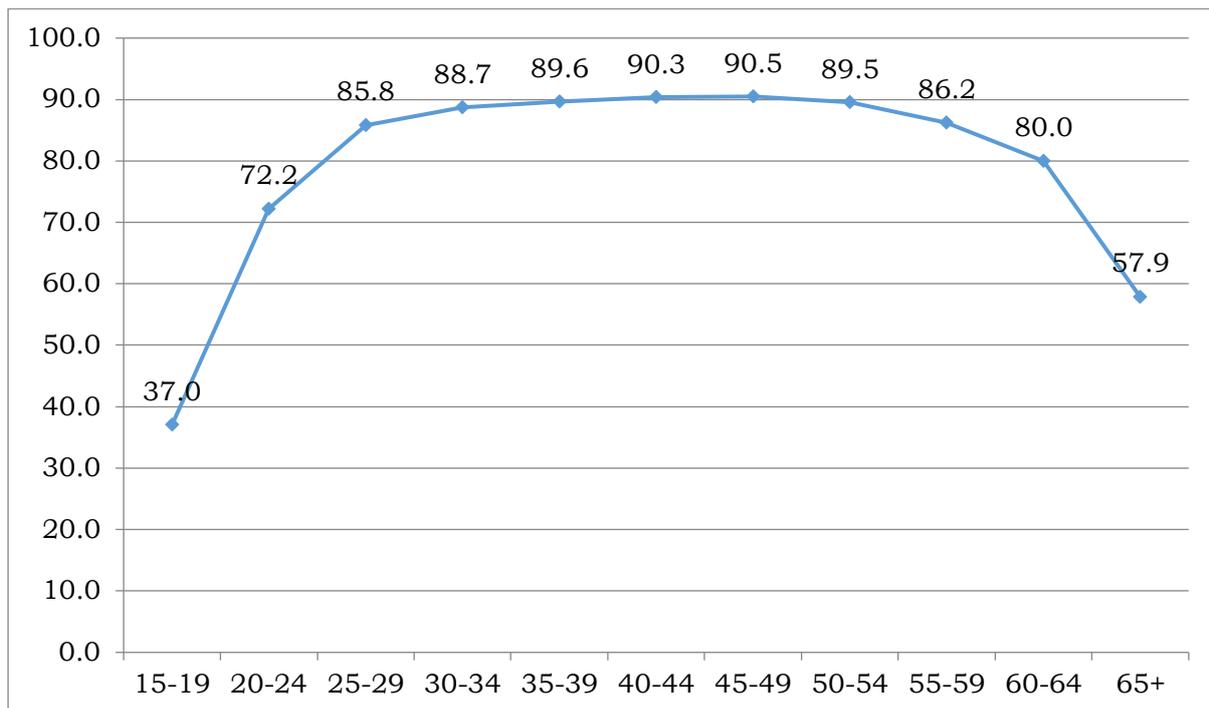


Sumber: ntt.bps.go.id (diolah).

Hasil SAKERNAS 2016 menunjukkan bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur, penduduk usia kerja laki-laki 2,4 kali lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja daripada penduduk usia kerja perempuan (Gambar 3.9). Akan tetapi, penduduk usia kerja laki-laki di Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,2 kali kurang cenderung untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja daripada penduduk usia kerja laki-laki Indonesia secara keseluruhan. Sementara itu, dibandingkan dengan penduduk usia kerja perempuan Indonesia secara keseluruhan, penduduk usia kerja perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,6 kali lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Menurut tempat tinggal, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, penduduk usia kerja perdesaan 1,5 kali lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja daripada penduduk usia kerja perkotaan. Selain itu, dibandingkan dengan penduduk usia kerja perdesaan

Indonesia secara keseluruhan, penduduk usia kerja perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,2 kali lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja.

Gambar 3.8
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut kelompok umur:
Nusa Tenggara Timur 2010

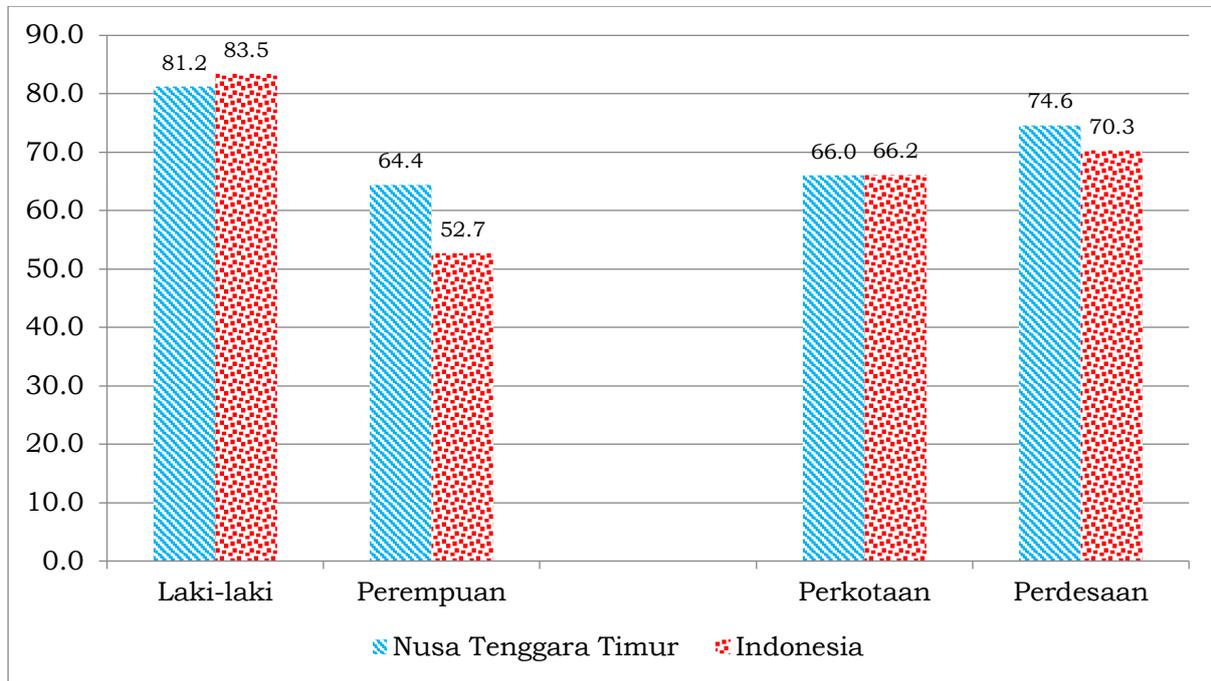


Sumber: sp.2010.bps.go.id (diolah).

Peningkatan partisipasi angkatan kerja berpendidikan menengah merupakan suatu tantangan penting dalam rangka optimalisasi penduduk usia produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil SP 2010 menunjukkan bahwa TPAK paling rendah untuk penduduk usia kerja berpendidikan SMP, diikuti dengan untuk penduduk usia kerja berpendidikan SMA (Gambar 3.10). Penduduk usia kerja berpendidikan rendah (SD atau lebih rendah) 2,4 kali lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja daripada penduduk usia kerja berpendidikan menengah (SMP atau SMA). Sementara itu, penduduk usia kerja berpendidikan tinggi (diploma atau universitas) 5,6 kali lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja daripada penduduk usia kerja berpendidikan menengah.

Gambar 3.9

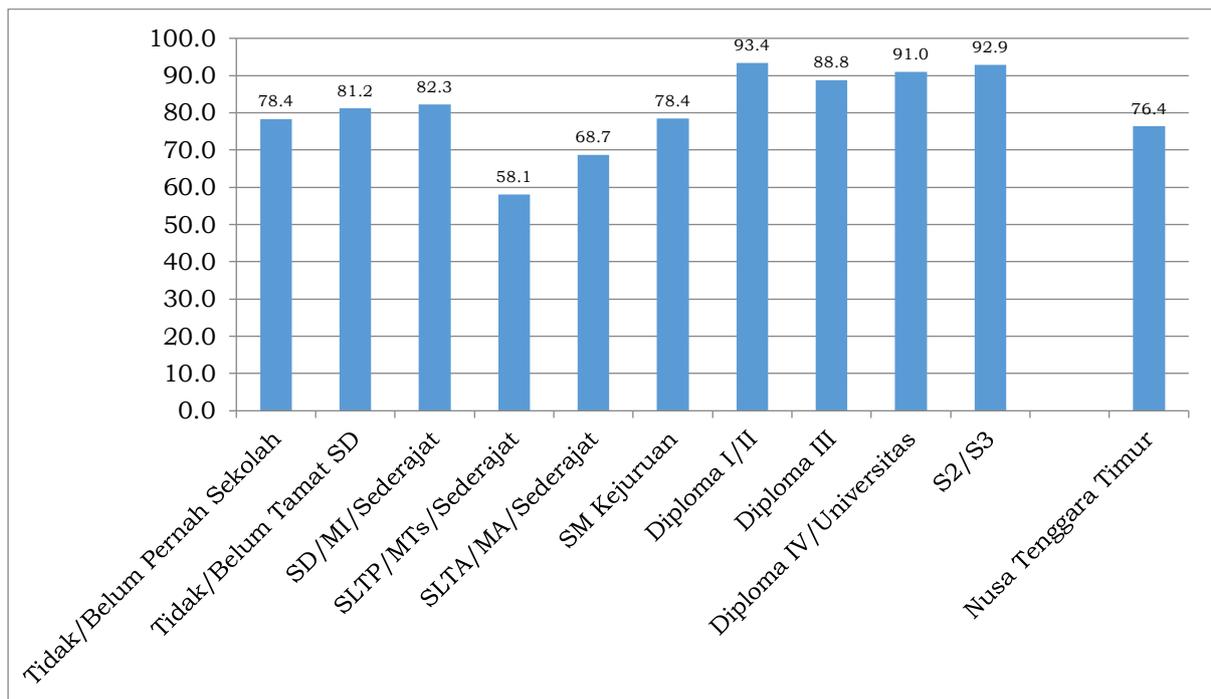
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut jenis kelamin dan tempat tinggal:
Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 2016**



Sumber: BPS (2016a) (diolah).

Gambar 3.10

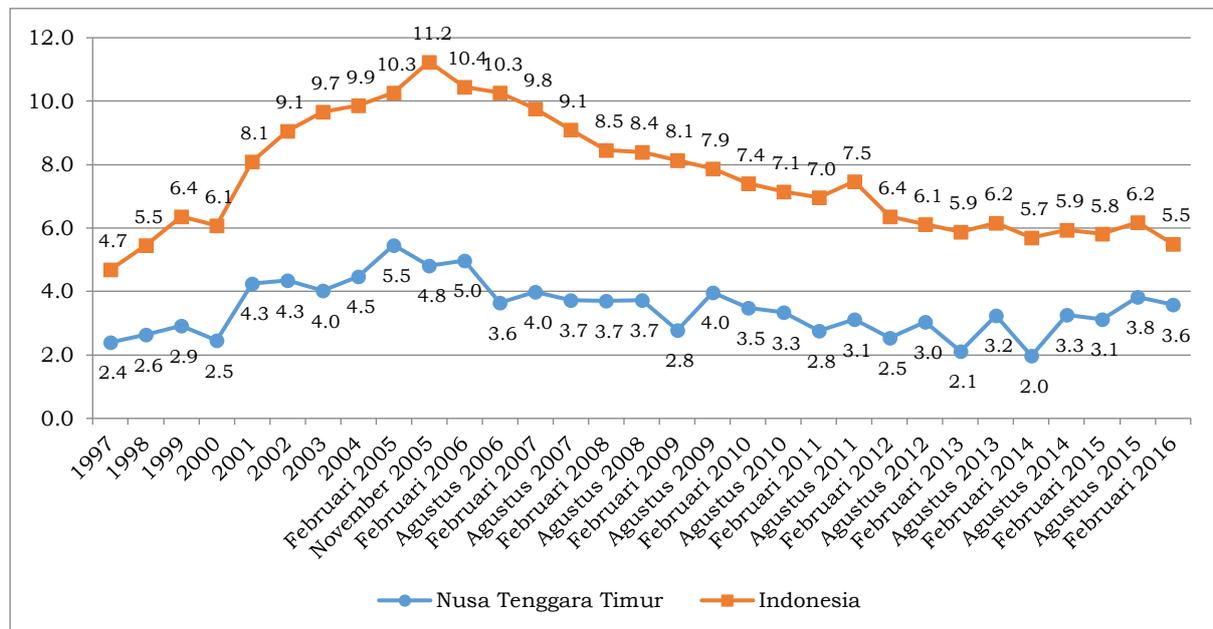
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut pendidikan:
Nusa Tenggara Timur 2010**



Sumber: sp2010.bps.go.id (diolah).

Hasil SAKERNAS 1997-2016 juga menunjukkan bahwa pengangguran terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur berfluktuasi dengan kecenderungan menurun (Gambar 3.11). Selain itu, pengangguran terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara konsisten lebih rendah daripada pengangguran terbuka Indonesia secara keseluruhan. Lebih rendahnya pengangguran terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur daripada di Indonesia secara keseluruhan dapat disebabkan karena sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian dan sektor informal yang cenderung lebih mudah untuk dimasuki.

Gambar 3.11
Tingkat Pengangguran Terbuka: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia
1997-2016

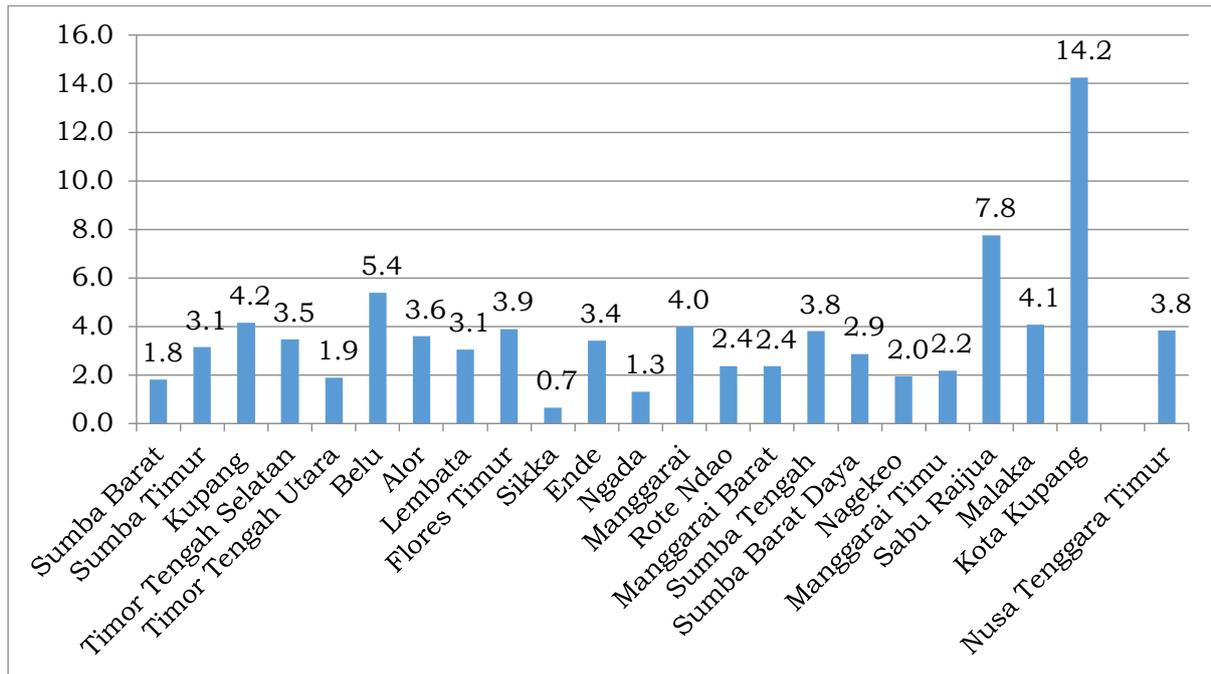


Sumber: www.bps.go.id (diolah).

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengangguran terbuka bervariasi secara nyata menurut kabupaten/kota (Gambar 3.12). Hasil SAKERNAS 2015 menunjukkan bahwa TPT paling rendah di Kabupaten Sikka (0,7%) dan paling tinggi di Kota Kupang (14,2%). Lebih rendahnya TPT di Kabupaten Sikka dan di kabupaten lainnya dapat disebabkan karena sebagian besar dari penduduk bekerja bekerja di sektor pertanian yang cenderung lebih mudah dimasuki karena tidak memerlukan kualifikasi tenaga kerja yang tinggi. Sementara itu, TPT paling tinggi di Kota

Kupang dapat disebabkan karena perekonomian didominasi oleh sektor nonpertanian yang memerlukan kualifikasi tenaga kerja tertentu sehingga cenderung lebih sulit untuk dimasuki.

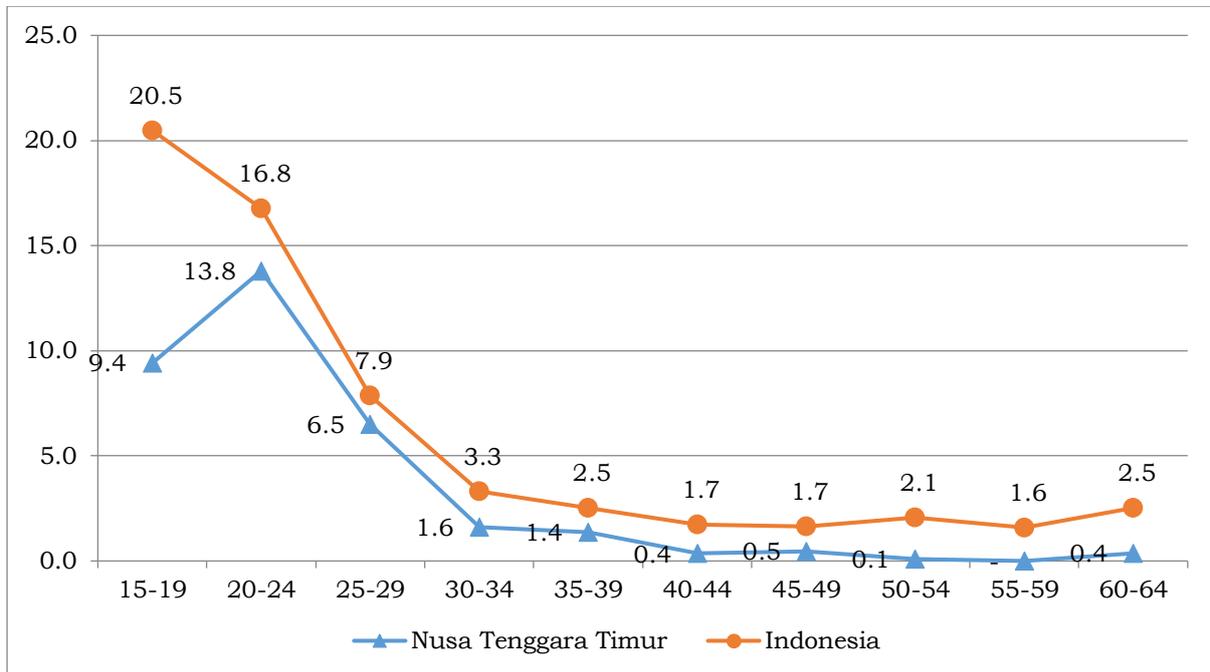
Gambar 3.12
Tingkat Pengangguran Terbuka menurut kabupaten/kota:
Nusa Tenggara Timur 2015



Sumber: ntt.bps.go.id (diolah).

Seperti halnya di Indonesia, TPT lebih tinggi pada angkatan kerja muda usia 15-29 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Gambar 3.13). Akan tetapi, angkatan kerja muda usia 15-29 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur kurang cenderung untuk menganggur daripada angkatan kerja muda usia 15-29 tahun Indonesia secara keseluruhan. Hasil SAKERNAS 2016 menunjukkan bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur, TPT paling tinggi pada angkatan kerja usia 20-24 tahun (13,8%), diikuti dengan angkatan kerja usia 15-19 tahun (9,4%) dan angkatan kerja usia 20-24 tahun (6,5%). Optimalisasi penduduk usia produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur memerlukan upaya peningkatan kesempatan kerja yang dapat menyerap angkatan kerja usia muda.

Gambar 3.13
Tingkat Pengangguran Terbuka menurut kelompok umur:
Nusa Tenggara Timur 2016



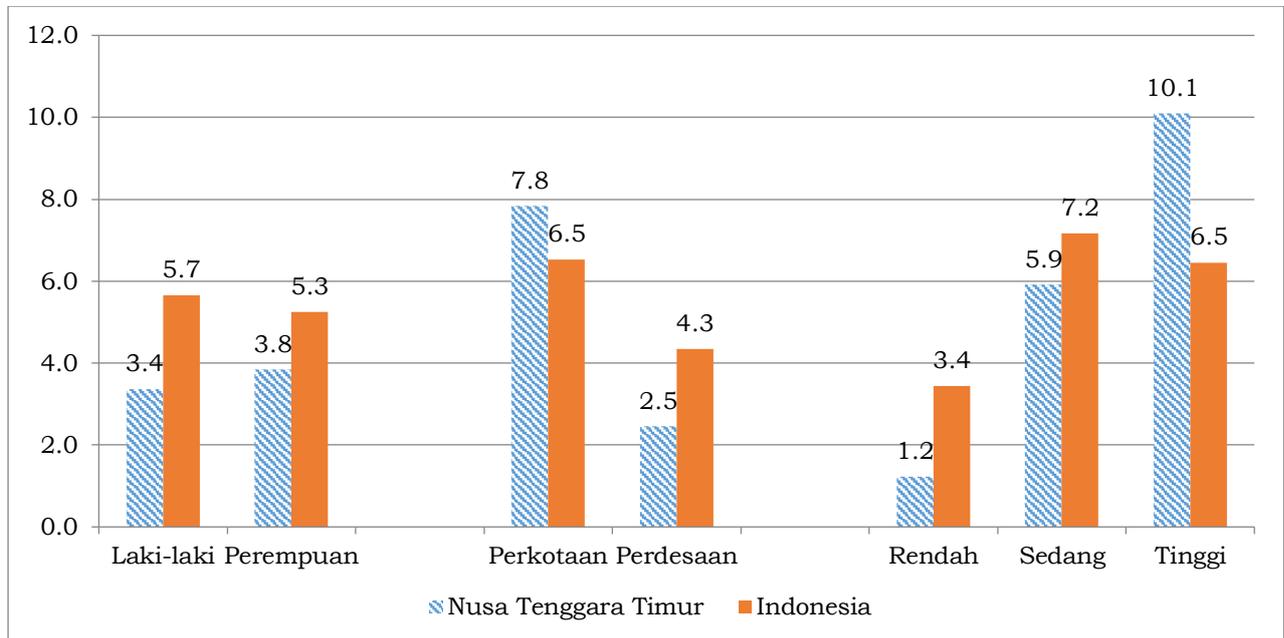
Sumber: BPS (2016a) (diolah).

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengangguran terbuka sedikit lebih tinggi pada perempuan daripada pada laki-laki, jauh lebih tinggi di perkotaan daripada di perdesaan, dan paling tinggi pada angkatan kerja berpendidikan tinggi (Gambar 3.14). TPT perkotaan dan TPT pendidikan tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur bahkan lebih tinggi daripada TPT perkotaan dan TPT pendidikan tinggi Indonesia. Angkatan kerja perkotaan dan pendidikan tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing 1,2 dan 1,6 kali lebih cenderung untuk menganggur daripada angkatan kerja perkotaan dan pendidikan tinggi Indonesia.

Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat memerlukan angkatan kerja perkotaan dan berpendidikan untuk pembangunan daerah yang saat ini sedang mengalami perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu, optimalisasi penduduk usia produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur harus diupayakan melalui peningkatan kesempatan kerja yang dapat menyerap angkatan kerja perkotaan dan pendidikan tinggi, khususnya kesempatan kerja sektor nonpertanian. Hal ini harus dilakukan agar sumber daya manusia yang potensial memilih untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 3.14

Tingkat Pengangguran Terbuka menurut jenis kelamin, tempat tinggal, dan pendidikan: Nusa Tenggara Timur 2016



Sumber: BPS (2016a) (diolah).

3.2. Lapangan Pekerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

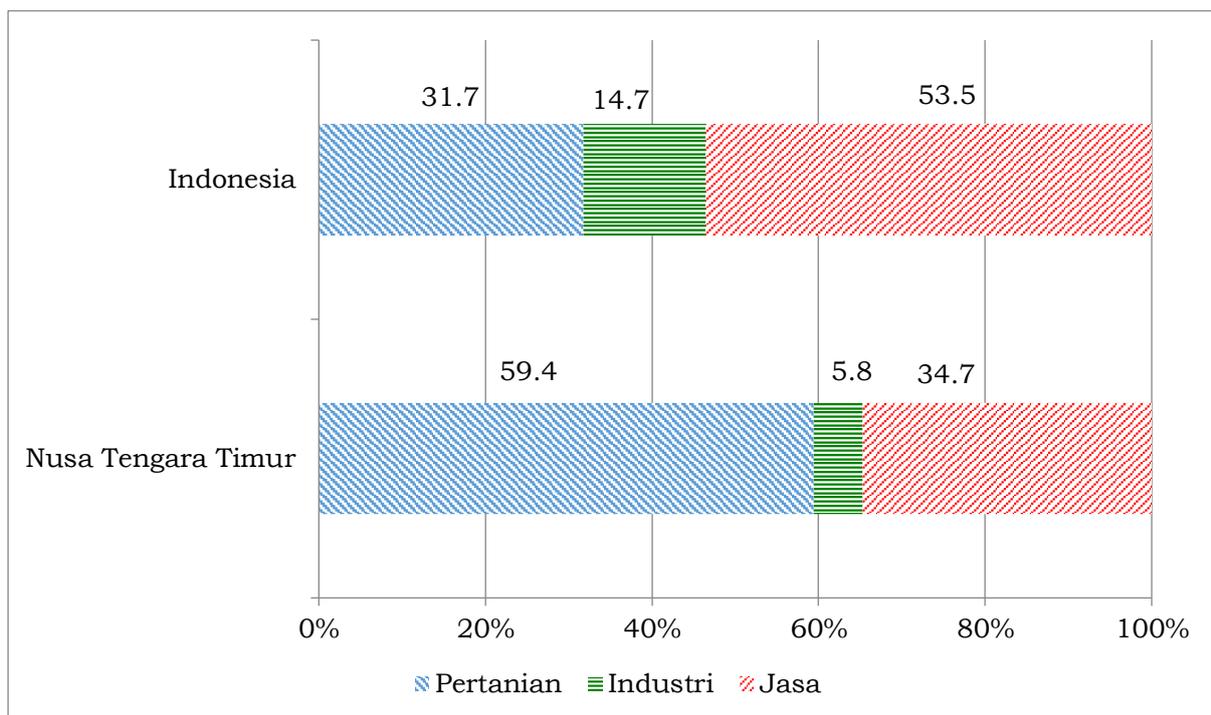
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, penduduk bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur dicirikan oleh penduduk bekerja sektor pertanian. Hasil SAKERNAS 2016 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja di sektor pertanian (59,4%), diikuti dengan di sektor jasa (34,7%) (Gambar 3.15). Hanya 5,8% penduduk yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja di sektor industri. Selain itu, penduduk bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur 3,2 kali lebih cenderung untuk bekerja di lapangan pertanian daripada penduduk bekerja di Indonesia secara keseluruhan.

Pembangunan dalam jangka panjang memerlukan sektor pertanian, khususnya untuk keamanan pangan. Akan tetapi, produktivitas sektor pertanian terhadap perekonomian relatif rendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada periode 2012-2015, sumbangan sektor pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung menurun, dari 30,1% pada tahun 2012 menjadi 29,7% pada tahun 2015 (ntt.bps.go.id). Hal ini mengindikasikan pergeseran struktur perekonomian dari

perekonomian tradisional ke perekonomian modern sedang berlangsung di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, optimalisasi penduduk usia produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur memerlukan peningkatan produktivitas sektor pertanian agar memberikan hasil yang lebih besar bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 3.15

**Distribusi persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama:
Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 2016**



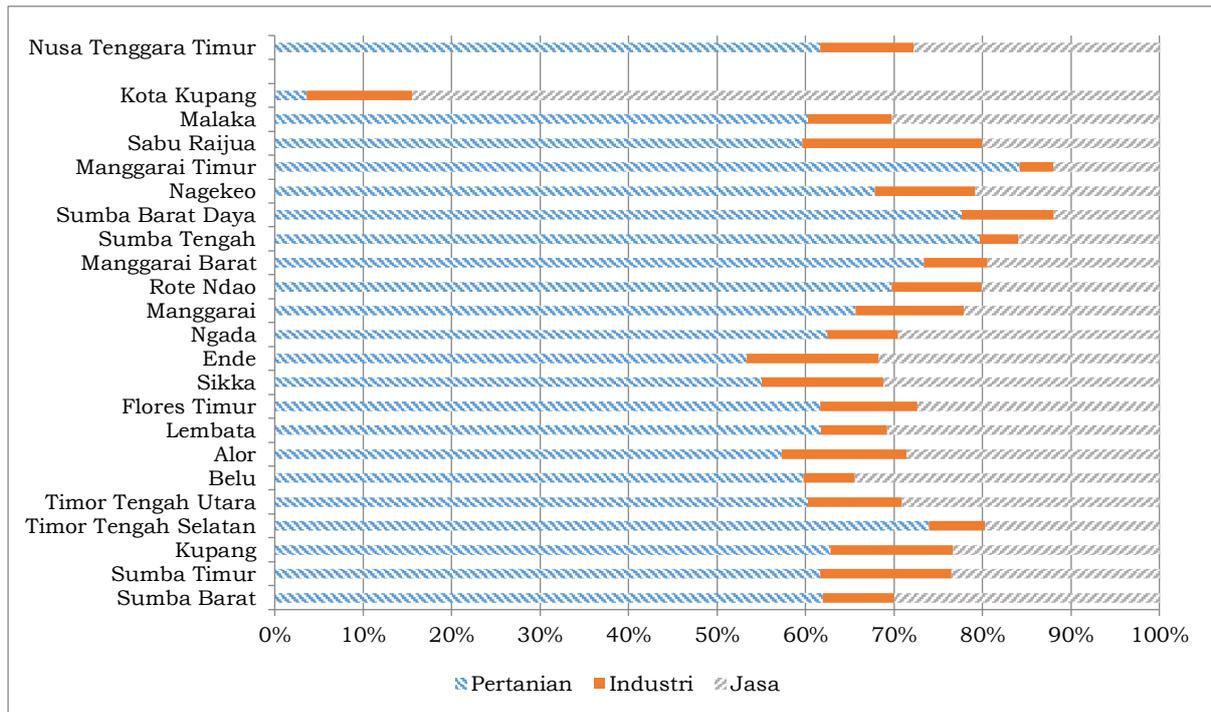
Sumber: BPS (2016a) (diolah).

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, distribusi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan bervariasi menurut kabupaten/kota (Tabel 3.16). Hasil SAKERNAS 2015 menunjukkan bahwa persentase penduduk bekerja sektor pertanian paling rendah di Kota Kupang (3,6%) dan paling tinggi di Kabupaten Manggarai Timur (84,2%). Sementara itu, persentase penduduk bekerja sektor industri bervariasi antara 3,4% di Kabupaten Manggarai Timur dan 20,4% di Kabupaten Sabu Raijua, yang dikenal dengan industri garamnya. Selanjutnya, persentase penduduk bekerja sektor jasa paling rendah di Kabupaten Sumba Barat Daya (11,9%) dan paling tinggi di Kota Kupang (84,5%). Optimalisasi penduduk usia produktif di Provinsi

Nusa Tenggara Timur harus memperhitungkan distribusi lapangan pekerjaan menurut kabupaten/kota.

Gambar 3.16

Distribusi persentase lapangan pekerjaan utama penduduk bekerja menurut kabupaten/kota: Nusa Tenggara Timur 2015

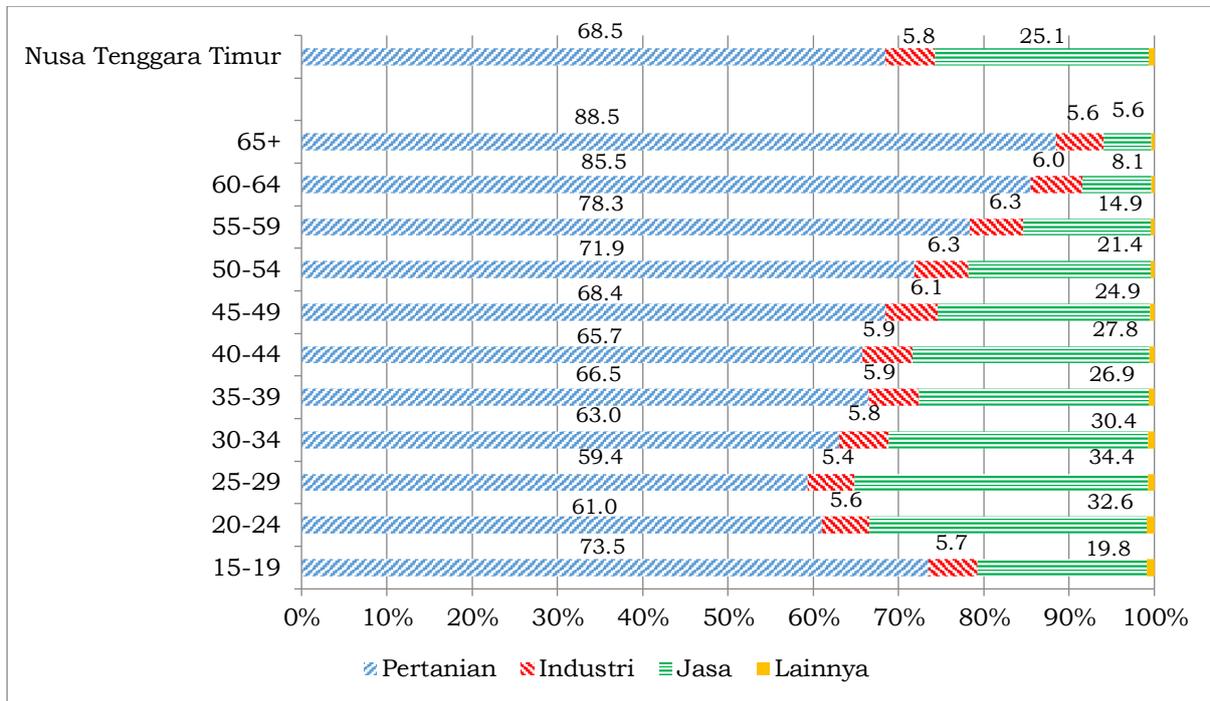


Sumber: ntt.bps.go.id (diolah).

Distribusi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga bervariasi menurut kelompok umur (Gambar 3.17). Hasil SP 2010 menunjukkan bahwa persentase penduduk bekerja sektor pertanian paling rendah pada kelompok umur 25-29 tahun (59,4%) dan paling tinggi pada kelompok umur 65 tahun ke atas (88,5%). Sementara itu, persentase penduduk bekerja sektor industri bervariasi antara 5,44% pada kelompok umur 25-29 tahun dan 6,32% pada kelompok umur 50-54 tahun. Selanjutnya, persentase penduduk bekerja sektor jasa paling rendah pada kelompok umur 65 tahun ke atas (5,6%) dan paling tinggi pada kelompok umur 25-29 tahun (34,4%). Optimalisasi penduduk usia produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur harus memperhitungkan distribusi lapangan pekerjaan menurut kelompok umur.

Gambar 3.17

Distribusi persentase lapangan pekerjaan utama penduduk bekerja menurut kelompok umur: Nusa Tenggara Timur 2010

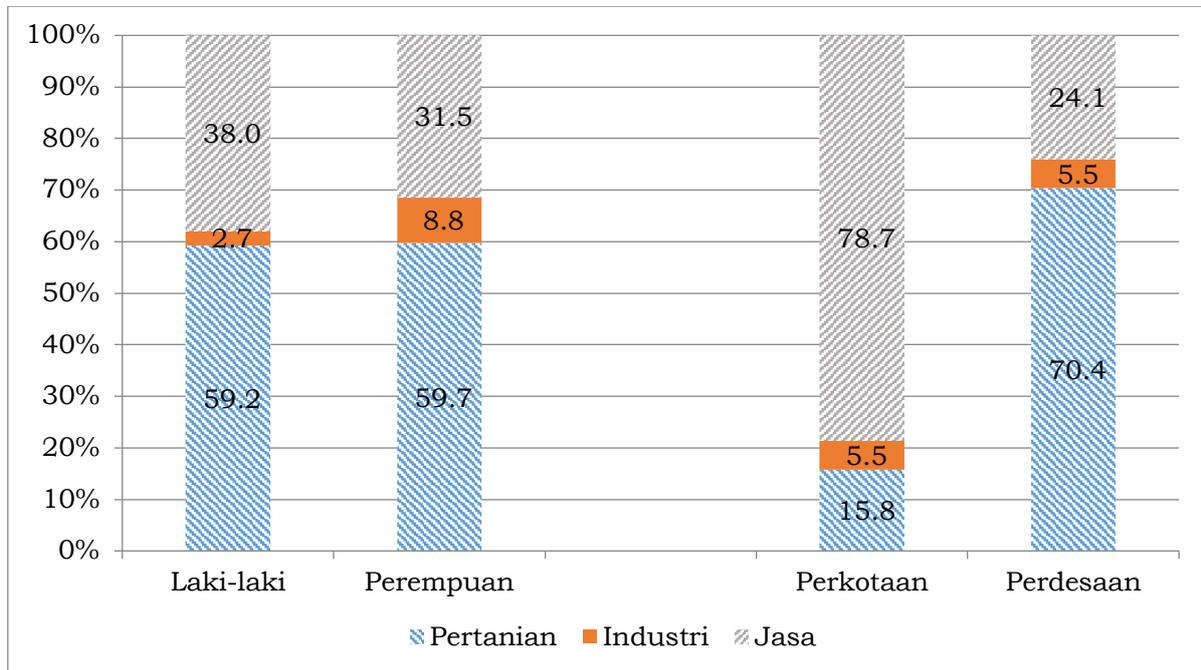


Sumber: sp.2010.bps.go.id (diolah).

Menurut jenis kelamin, penduduk bekerja laki-laki dan penduduk bekerja perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kecenderungan yang sama untuk bekerja di sektor pertanian (Gambar 3.18). Akan tetapi, penduduk bekerja laki-laki 1,3 kali lebih cenderung untuk bekerja di sektor jasa daripada penduduk bekerja perempuan. Sementara itu, penduduk bekerja perempuan 3,4 kali lebih cenderung untuk bekerja di sektor industri daripada penduduk bekerja laki-laki. Menurut tempat tinggal, penduduk bekerja perkotaan 11,7 kali lebih cenderung untuk bekerja di sektor jasa daripada penduduk bekerja perdesaan, sementara penduduk bekerja perdesaan 12,7 kali cenderung untuk bekerja di sektor pertanian daripada penduduk bekerja perkotaan. Distribusi lapangan pekerjaan menurut jenis kelamin dan wilayah merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam rangka optimalisasi penduduk usia produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 3.18

Distribusi persentase lapangan pekerjaan penduduk bekerja menurut jenis kelamin dan tempat tinggal: Nusa Tenggara Timur 2016

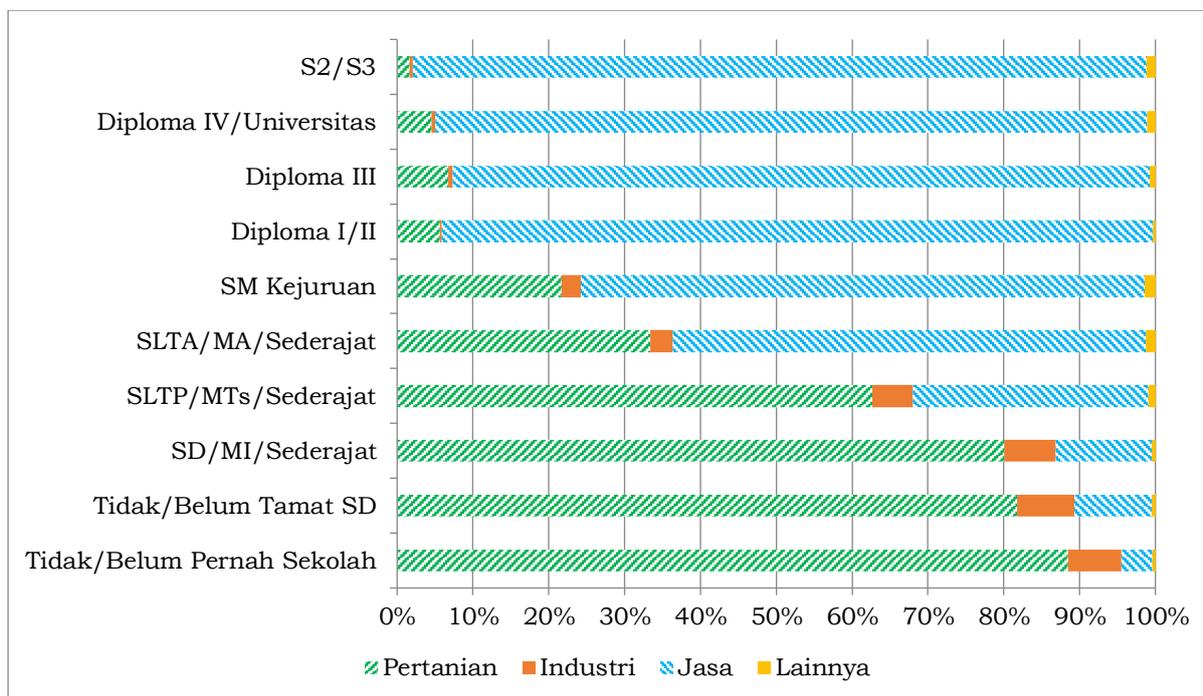


Sumber: BPS (2016a) (diolah).

Penduduk bekerja dengan pendidikan rendah lebih cenderung mengisi lapangan pekerjaan pertanian, sementara penduduk bekerja dengan pendidikan tinggi lebih cenderung mengisi lapangan pekerjaan jasa. Hasil SP 2010 menunjukkan bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin kecil persentase penduduk bekerja sektor pertanian dan semakin besar persentase penduduk bekerja sektor jasa. Mengingat sektor jasa merupakan penyumbang utama perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka optimalisasi penduduk usia produktif melalui peningkatan pendidikan merupakan salah satu strategi paling penting agar penduduk usia produktif dapat mengakses kesempatan kerja di sektor jasa yang lebih cenderung memerlukan kualifikasi tertentu untuk dimasuki. Perkembangan perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini mengindikasikan adanya kebutuhan penduduk bekerja berkualifikasi, khususnya di Kota Kupang.

Gambar 3.19

Distribusi persentase lapangan pekerjaan utama penduduk bekerja menurut pendidikan: Nusa Tenggara Timur 2010



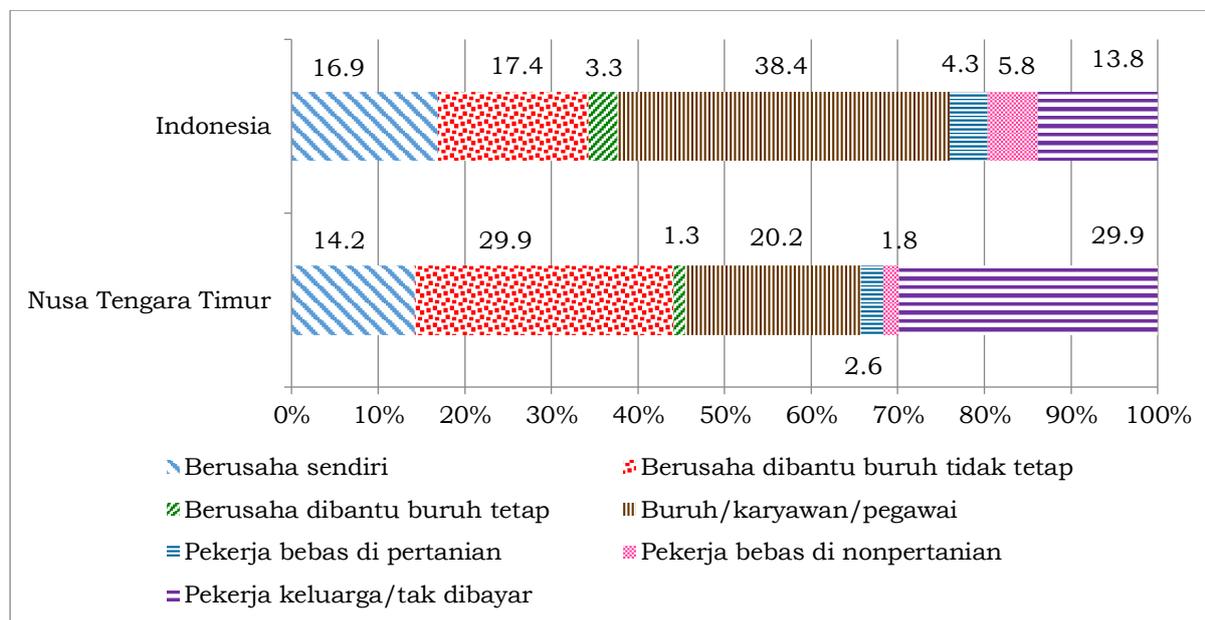
Sumber: sp.2010.bps.go.id (diolah).

3.3. Status Pekerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sebagian besar penduduk yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur berstatus informal (Gambar 3.20). Hasil SAKERNAS 2016 menunjukkan bahwa 78,4% penduduk bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur berstatus informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tidak dibayar). Selain itu, penduduk bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih dari 13 kali lebih cenderung untuk berstatus informal daripada penduduk bekerja di Indonesia secara keseluruhan. Secara khusus, penduduk bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2,7 kali lebih cenderung untuk berstatus pekerja keluarga/tidak dibayar dan 2,5 kali kurang cenderung untuk berstatus buruh/karyawan/pegawai dibandingkan penduduk bekerja Indonesia secara keseluruhan. Perbaikan status pekerjaan dari penduduk bekerja merupakan agenda penting lainnya dalam rangka optimalisasi penduduk usia produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 3.20

**Distribusi persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama:
Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 2016**



Sumber: BPS (2016a).

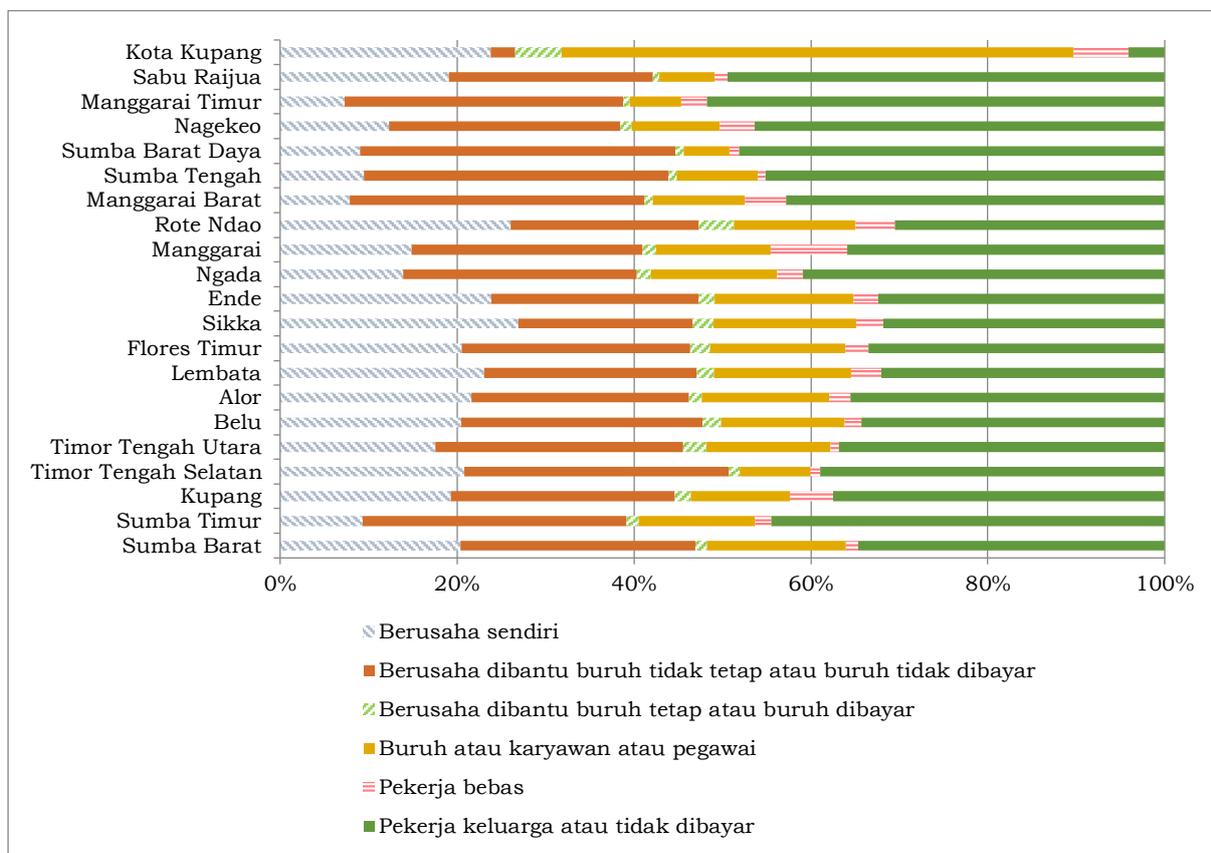
Penduduk bekerja di 20 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi oleh penduduk bekerja sektor formal, paling tinggi di Kabupaten Manggarai Timur (93,5%) (Gambar 3.21). Hanya di Kota Kupang penduduk bekerja didominasi penduduk bekerja sektor formal (berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai) (63,1%). Pekerja keluarga/tidak dibayar mendominasi penduduk bekerja di 20 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari yang paling rendah 30,5% di Kabupaten Rote Ndao sampai yang paling tinggi 51,8% di Kabupaten Manggarai Timur.

Menurut kelompok umur, hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa pola persentase penduduk bekerja sektor formal di Provinsi Nusa Tenggara Timur berbentuk huruf U terbalik: meningkat seiring dengan meningkatnya umur, mencapai puncak pada kelompok umur 25-29 tahun (22,6%), dan kemudian menurun dan mencapai tingkat paling rendah pada kelompok umur 65 tahun ke atas, hanya 2,3% (Gambar 3.22). Selain itu, penduduk bekerja usia 15-19 tahun dan 20-24 tahun merupakan penduduk bekerja yang paling rentan di Provinsi Nusa Tenggara Timur: 68,7% penduduk bekerja usia 15-19 tahun dan 50,1% penduduk bekerja usia 20-24 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah

penduduk bekerja keluarga/tidak dibayar. Peningkatan status bekerja penduduk usia produktif paling muda (15-24 tahun) juga merupakan salah satu agenda penting untuk optimalisasi penduduk usia produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena masa bekerja mereka yang masih panjang, sekitar 40 – 49 tahun lagi jika akan bekerja hingga usia 64 tahun.

Gambar 3.21

Distribusi persentase status pekerjaan utama penduduk bekerja menurut kabupaten/kota: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 2010



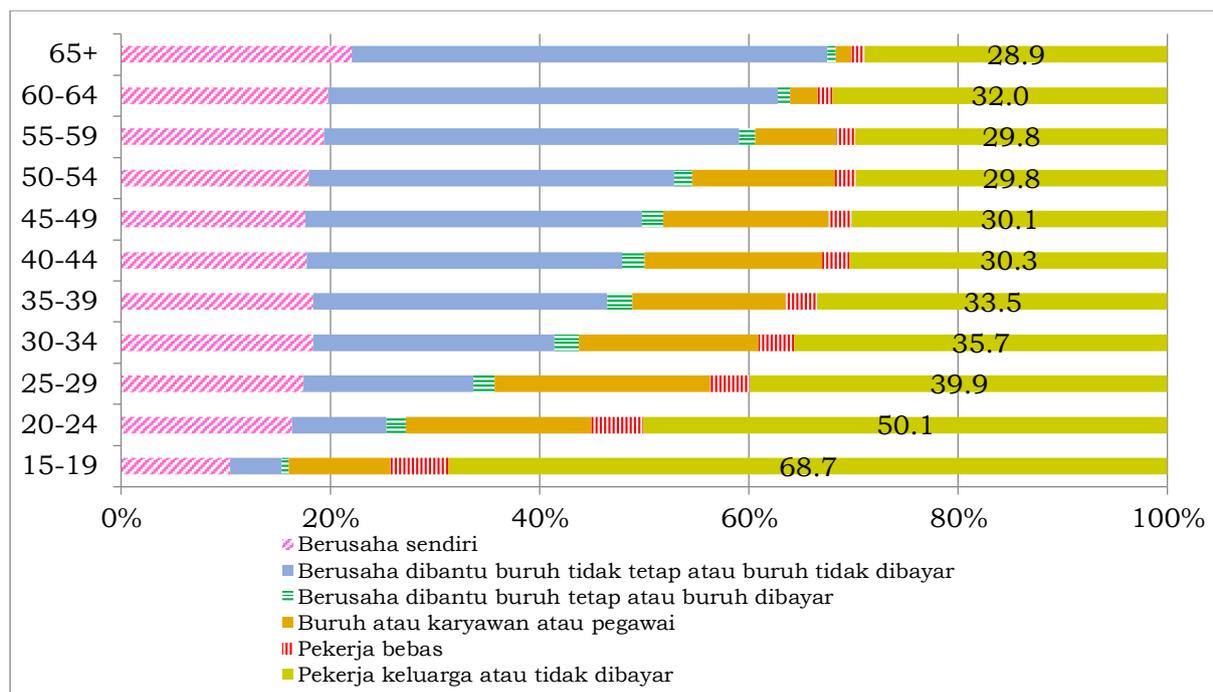
Sumber: sp.2010.bps.go.id (diolah).

Penduduk bekerja perempuan dan penduduk bekerja perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kesempatan yang lebih rendah untuk bekerja di sektor formal dibandingkan, masing-masing, penduduk bekerja laki-laki dan penduduk bekerja perkotaan (Gambar 3.23). Hasil SAKERNAS 2016 menunjukkan bahwa penduduk bekerja perempuan dan penduduk bekerja perdesaan masing-masing 1,4 kali dan 5,8 kali kurang cenderung untuk bekerja di sektor formal

dibandingkan, masing-masing, penduduk bekerja laki-laki dan penduduk bekerja perkotaan. Selain itu, penduduk bekerja perempuan dan penduduk bekerja di perdesaan didominasi oleh pekerja keluarga/tidak dibayar, masing-masing 46,5% dan 34%. Penduduk bekerja perempuan 4,5 kali lebih cenderung untuk berstatus pekerja keluarga/tidak dibayar dibandingkan dengan penduduk bekerja laki-laki, sementara penduduk bekerja perdesaan 3,3 kali lebih cenderung untuk berstatus pekerja keluarga/tidak dibayar dibandingkan dengan penduduk bekerja perkotaan. Peningkatan status bekerja penduduk bekerja perempuan dan penduduk bekerja perdesaan merupakan suatu strategi yang penting dalam rangka optimalisasi penduduk usia produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 3.22

Distribusi persentase status pekerjaan utama penduduk bekerja menurut kelompok umur: Nusa Tenggara Timur 2010



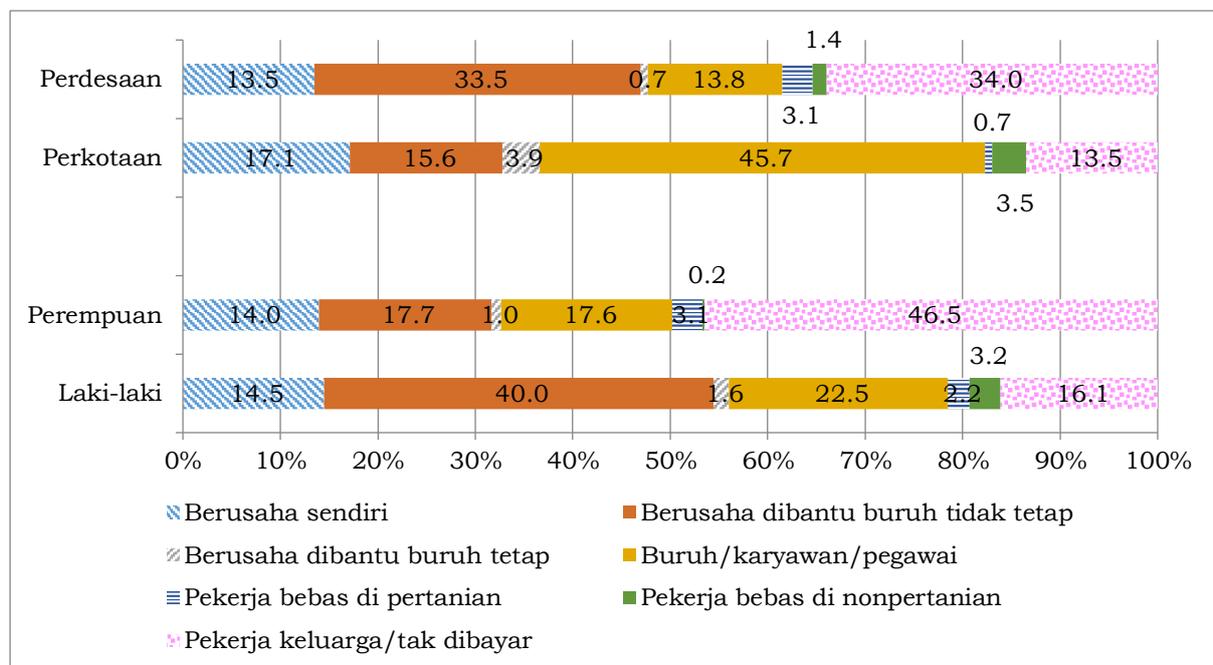
Sumber: sp.2010.bps.go.id (diolah).

Pendidikan merupakan modal utama untuk mengakses kesempatan kerja sektor formal. Hasil SP 2010 menunjukkan bahwa, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi persentase penduduk bekerja sektor formal. Hanya 4,5% penduduk bekerja berpendidikan rendah yang bekerja di sektor formal, sementara angka ini 31,7% untuk penduduk bekerja

berpendidikan menengah dan 86,7% untuk penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Gambar 3.24). Artinya, penduduk bekerja berpendidikan rendah dan penduduk bekerja berpendidikan menengah masing-masing 139 kali dan 14 kali kurang cenderung untuk bekerja di sektor formal. Selain itu, sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan rendah dan SMP adalah pekerja keluarga/tidak dibayar. Peningkatan status bekerja penduduk bekerja berpendidikan rendah merupakan upaya yang penting agar penduduk usia produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur optimal.

Gambar 3.23

Distribusi persentase status pekerjaan utama penduduk bekerja menurut jenis kelamin dan tempat tinggal: Nusa Tenggara Timur 2016

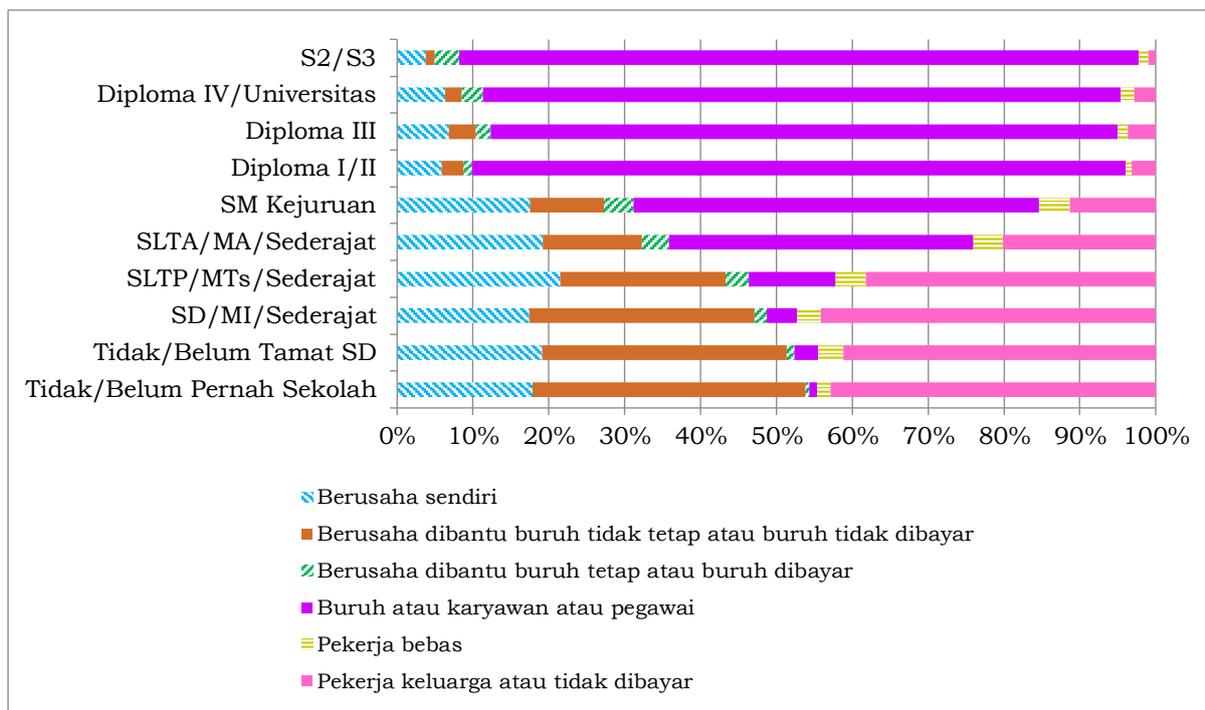


Sumber: BPS (2016a) (diolah).

Pada Gambar 3.24 disajikan distribusi status pekerjaan utama penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut hasil SP 2010. Terlihat bahwa sebagian besar penduduk bekerja sektor pertanian berstatus pekerja keluarga/tidak dibayar (49,4%), sebagian besar penduduk bekerja sektor industri berstatus berusaha sendiri (48%), dan sebagian besar penduduk bekerja sektor jasa berstatus buruh/karyawan/pegawai (53,6%). Peningkatan status bekerja penduduk bekerja sektor pertanian dan industri merupakan strategi yang penting dalam rangka optimalisasi penduduk usia produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 3.24

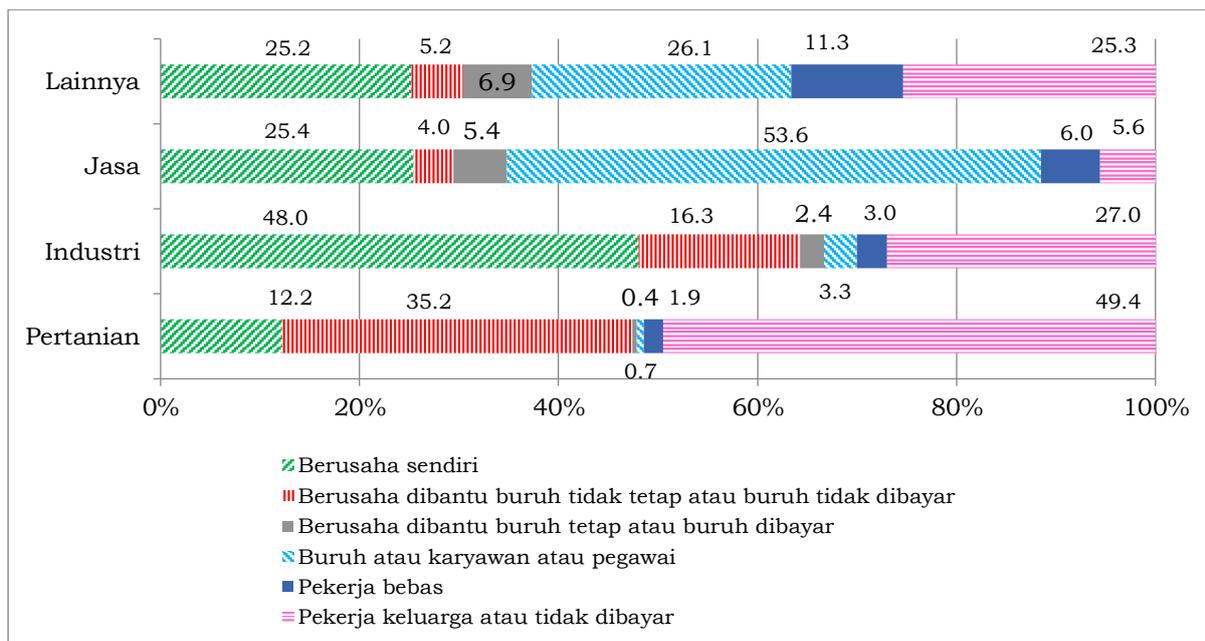
Distribusi persentase status pekerjaan utama penduduk bekerja menurut pendidikan: Nusa Tenggara Timur 2010



Sumber: sp.2010.bps.go.id (diolah).

Gambar 3.25

Distribusi persentase status pekerjaan utama penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama: Nusa Tenggara Timur 2010



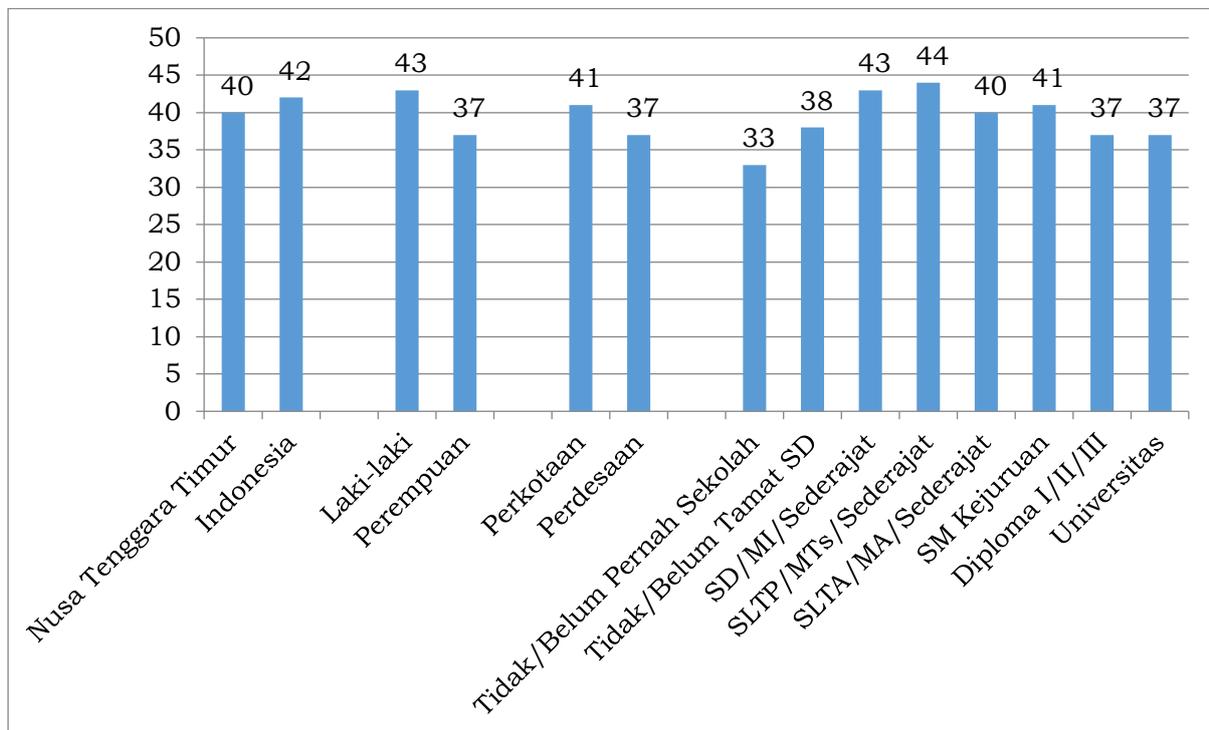
Sumber: sp.2010.bps.go.id (diolah).

3.4. Jam Kerja dan Upah Pekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jam kerja merupakan salah satu faktor penentu produktivitas pekerja. Jika hal yang lain sama, pekerja yang bekerja lebih lama cenderung lebih produktif daripada pekerja lainnya. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan produktivitas penduduk bekerja yang paling rendah di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena pekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara rata-rata bekerja lebih singkat daripada pekerja Indonesia secara keseluruhan. Hasil SAKERNAS 2016 menunjukkan bahwa pekerja (buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, dan pekerja bebas di nonpertanian) di Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja rata-rata dua jam lebih pendek daripada pekerja Indonesia secara keseluruhan (Gambar 3.25).

Gambar 3.25

Jam kerja rata-rata seminggu yang lalu pekerja menurut jenis kelamin, tempat tinggal dan pendidikan: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 2016



Sumber: BPS (2016b) (diolah).

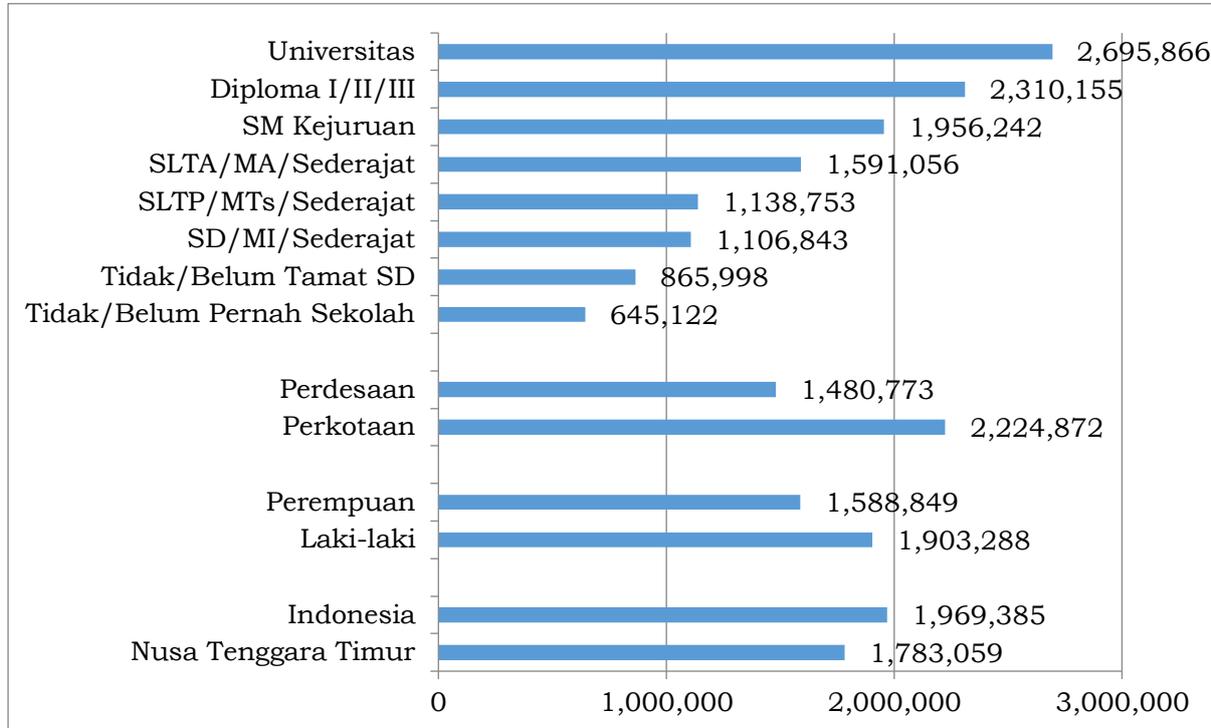
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur pekerja perempuan secara rata-rata bekerja empat jam lebih singkat daripada pekerja laki-laki, sementara pekerja perdesaan secara rata-rata bekerja enam jam lebih singkat daripada pekerja perkotaan. Selain itu, jam kerja rata-rata paling pendek pada pekerja tidak/belum pernah sekolah, meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan pekerja, mencapai puncak pada pekerja berpendidikan SMP, dan kemudian menurun untuk pekerja berpendidikan lebih tinggi. Peningkatan jam kerja perempuan, perdesaan, dan berpendidikan rendah merupakan suatu upaya yang penting dalam rangka optimalisasi penduduk usia produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kesenjangan penghasilan (upah/gaji/pendapatan bersih (rupiah) rata-rata sebulan) nyata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil SAKERNAS 2016 menunjukkan bahwa penghasilan pekerja perempuan 1,2 kali lebih rendah daripada penghasilan pekerja laki-laki, sementara penghasilan pekerja perdesaan 1,5 kali lebih rendah daripada penghasilan pekerja perkotaan. Selain itu, semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi penghasilan (Gambar 3.26). Penghasilan pekerja berpendidikan tidak/belum pernah sekolah, tidak belum tamat SD, tamat SD, dan tamat SMA masing-masing 4,2, 3,1, 2,4, dan 1,7 kali lebih rendah daripada penghasilan pekerja lulusan universitas. Penurunan kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan, antara perkotaan dan perdesaan, dan antartingkat pendidikan merupakan suatu strategi penting agar penduduk usia produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur optimal.

Kesenjangan dalam penghasilan antara laki-laki dan perempuan menurut tingkat pendidikan juga nyata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meskipun tingkat pendidikan sama, penghasilan pekerja perempuan lebih rendah daripada penghasilan pekerja perempuan. Penghasilan pekerja perempuan lulusan SMA 1,5 kali lebih rendah daripada penghasilan pekerja laki-laki lulusan SMA. Sementara itu, penghasilan pekerja perempuan lulusan diploma juga 1,5 kali lebih rendah daripada penghasilan pekerja laki-laki lulusan diploma. Selanjutnya, penghasilan pekerja perempuan lulusan universitas 1,4 kali lebih rendah daripada penghasilan pekerja laki-laki lulusan universitas.

Gambar 3.26

Upah/gaji/pendapatan bersih (rupiah) rata-rata sebulan pekerja menurut jenis kelamin, tempat tinggal dan pendidikan: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 2016



Sumber: BPS (2016b) (diolah).

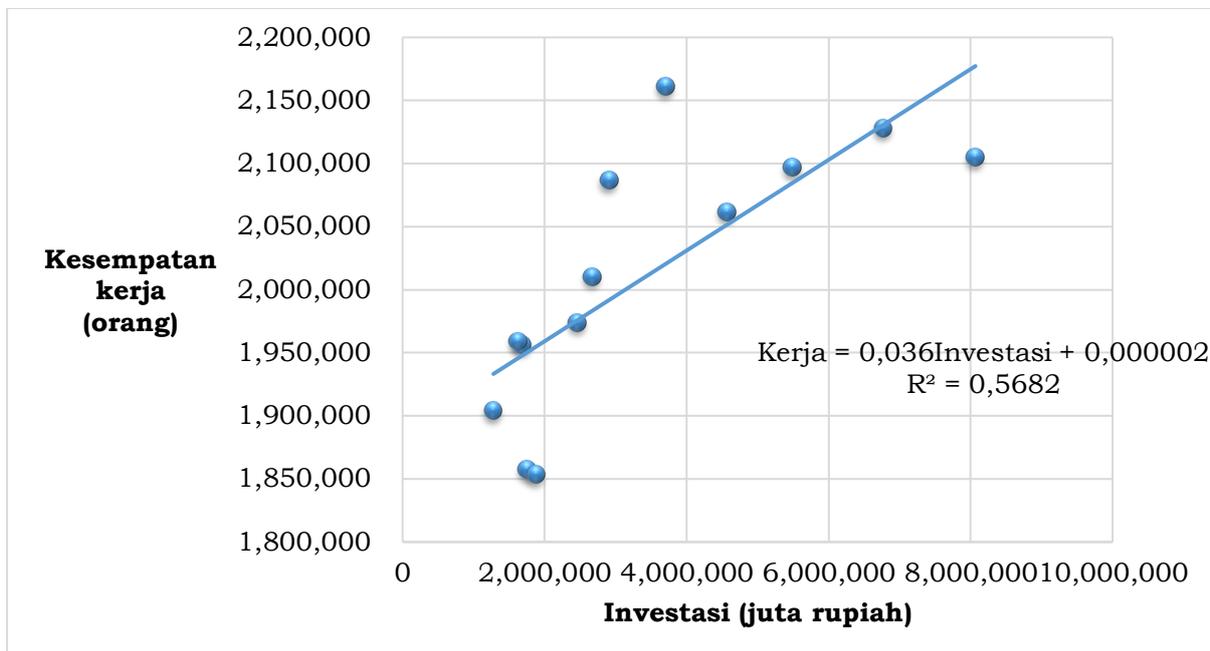
3.5. Investasi dan Kesempatan Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam penyerapan angkatan kerja. Data investasi dan kesempatan kerja pada periode 2001-2013 menunjukkan bahwa investasi dan kesempatan kerja cenderung meningkat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, grafik garis linier antara investasi dan kesempatan kerja menunjukkan bahwa peningkatan investasi sebesar satu juta rupiah, akan menyerap tenaga kerja sebanyak 0,036 orang, atau investasi sebesar satu miliar rupiah akan menyerap tenaga kerja sebanyak 36 orang (Gambar 3.27). Artinya, investasi merupakan suatu instrumen untuk meningkatkan kesempatan kerja dan optimalisasi penduduk usia produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara umum akan terjadi peningkatan kesempatan kerja jika pemangku kepentingan meningkatkan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Investasi yang dimaksud dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun investasi swasta.

Pada Bab 2 sudah didiskusikan permasalahan luaran pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu rendahnya investasi infrastruktur dalam kebutuhan dasar. Dalam hal jarak geografis, terdapat sejumlah kabupaten yang tidak dapat dilalui dengan jalur darat maupun laut. Hal ini menyulitkan bagi pemerataan pembangunan. Pemerintah perlu membangun infrastruktur, khususnya pembangunan pelabuhan, agar semua kabupaten dapat mudah dilalui dan terhubung. Selain itu, pendistribusian anggaran pembangunan sulit di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika hanya mengandalkan jalur udara (penerbangan), maka kabupaten yang tidak dapat dilalui dengan jalur darat maupun laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur sulit mendapatkan porsi pembangunan yang memadai, sebagaimana halnya kabupaten lainnya yang dekat dengan ibu kota provinsi. Dalam rangka optimalisasi penduduk usia produktif, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam pemerataan pembangunan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 3.27

Investasi dan Kesempatan Kerja: Nusa Tenggara Timur 2001-2013



Sumber: INDODAPOER Bank Dunia (diolah).

3.6. Permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup permasalahan angkatan kerja, pengangguran, lapangan pekerjaan, status pekerjaan, jam kerja, dan penghasilan pekerja. Dalam hal angkatan kerja, sebagian besar angkatan kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur tinggal di perdesaan dan berpendidikan rendah. Dalam hal pengangguran, sebagian besar pengangguran terbuka berusia 15-29 tahun dan berpendidikan menengah.

Dalam partisipasi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja paling rendah di Kota Kupang dan pada angkatan kerja berpendidikan menengah. Dalam hal pengangguran terbuka, tingkat pengangguran terbuka paling tinggi di Kota Kupang serta lebih tinggi pada angkatan kerja berusia 15-24 tahun, di perkotaan dan berpendidikan tinggi.

Dalam hal lapangan pekerjaan, sebagian besar penduduk bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja di sektor pertanian, terutama di perdesaan dan pada penduduk bekerja berpendidikan rendah. Dalam hal status pekerjaan, sebagian besar penduduk bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sebagai pekerja sektor informal, terutama sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar. Mayoritas penduduk bekerja usia muda, di perdesaan, perempuan, berpendidikan rendah, dan yang bekerja di sektor pertanian adalah pekerja keluarga/tidak dibayar.

Dalam hal jam kerja, pekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara rata-rata bekerja lebih singkat daripada pekerja Indonesia secara keseluruhan. Jam kerja pekerja perempuan, perdesaan, dan berpendidikan rendah lebih pendek daripada jam kerja pekerja lainnya. Dalam hal penghasilan, di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat kesenjangan penghasilan menurut jenis kelamin, tempat tinggal, dan pendidikan.

BAB 4
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA DAN PENDUDUK USIA PRODUKTIF
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

4.1. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan permasalahan kependudukan dan keluarga berencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka optimalisasi penduduk usia produktif adalah penurunan tingkat kelahiran dan pengelolaan mobilitas penduduk. Strategi yang dapat dilakukan untuk penurunan tingkat kelahiran meliputi penguatan pelayanan keluarga berencana (KB), penyediaan layanan dan alat KB yang terjangkau, peningkatan prevalensi KB, peningkatan penggunaan metode KB jangka panjang, penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, dan penanganan komplikasi berat dan kegagalan kontrasepsi. Strategi yang dapat dilakukan untuk pengelolaan mobilitas penduduk adalah penciptaan kesempatan kerja produktif, layak dan remuneratif, serta penanganan penduduk pendatang dari luar negeri.

Sumber daya manusia berkualitas merupakan faktor kunci untuk penurunan tingkat kelahiran dan pengelolaan mobilitas penduduk. Oleh karena itu, strategi yang juga harus dilakukan adalah peningkatan jaminan kesehatan, perluasan pendidikan menengah universal, peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan akses sumber energi, penurunan kemiskinan dan peningkatan perekonomian.

4.2. Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Penduduk Usia Produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka optimalisasi penduduk usia produktif adalah peningkatan pendidikan angkatan kerja, peningkatan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda serta berpendidikan menengah

dan tinggi, peningkatan keterampilan angkatan kerja di perkotaan, peningkatan produktivitas sektor pertanian, penurunan pekerja keluarga/tidak dibayar, dan penurunan kesenjangan penghasilan.

Setiap peningkatan pendidikan satu jenjang di Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdampak pada kenaikan upah/gaji/rata-rata sebesar Rp. 340.000 per bulan. Oleh karena itu, strategi peningkatan pendidikan angkatan kerja adalah dengan peningkatan pendidikan pekerja dengan mengupayakan agar semua pekerja mendapatkan pendidikan formal. Bagi pekerja yang mengalami hambatan mendapatkan pendidikan formal dengan kelompok usia sekolah, pemerintah dapat dan perlu mendorong mereka menempuh pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan pemerintah Republik Indonesia, yang telah mempunyai program pendidikan kesetaraan yang meliputi program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Bagi tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tinggi dapat mengikuti perkuliahan melalui Universitas Terbuka. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga kerja dapat membangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan pendidikan (modal manusia) bagi pekerja yang kesulitan waktu menempuh pendidikan formal. Strategi pelatihan adalah dengan memperhatikan kebutuhan keahlian pada lapangan kerja yang tersedia dan juga perlu memberi pekerja dengan sertifikasi keahlian. Hal ini diperlukan agar pasar kerja dapat memberi imbalan yang sesuai atas keahlian dan spesifikasi pekerja tersebut.

Salah satu permasalahan yang dihadapi pekerja usia muda serta berpendidikan menengah dan tinggi adalah permintaan tenaga kerja yang rendah pada kelompok ini. Pemangku kepentingan perlu membangun dan mengarahkan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor jasa agar selaras dengan permintaan tenaga kerja pada angkatan kerja usia muda serta berpendidikan menengah dan tinggi. Selain itu, dari sisi permintaan tenaga kerja, sektor jasa menjadi faktor permintaan terbesar bagi pekerja dengan kualifikasi pendidikan menengah dan tinggi. Khusus untuk pekerja berusia muda, perlu dilakukan moneterisasi masyarakat, yaitu agar transaksi ekonomi dilakukan melalui pasar dan menggunakan uang.

Proporsi terbesar pekerja di perkotaan adalah buruh/karyawan/pegawai. Pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai adalah pekerja yang menuntut

keterampilan. Peningkatan keterampilan pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai merupakan suatu keharusan. Pemangku kepentingan harus mendorong agar pekerja di perkotaan mengikuti pendidikan melalui pendidikan formal dan pelatihan melalui pendidikan nonformal. Pendidikan formal dapat ditempuh dengan mengikuti pendidikan kesetaraan dan pendidikan nonformal dapat dilakukan dengan pelatihan bersertifikasi. Perlu juga didorong pembangunan pelatihan bersertifikasi yang dilakukan pemerintah bersama-sama dengan asosiasi serikat pekerja sektoral. Misalnya, pemerintah perlu memberi kualifikasi standar (standarisasi pekerja pada keahlian mengelas logam atau pekerja pada keahlian kecantikan). Setiap jenjang keahlian dapat diberi sertifikat.

Salah satu ciri sektor pertanian di negara berkembang adalah produktivitas yang rendah. Hal yang sama terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini terjadi karena sektor pertanian dikelola secara tradisional oleh keluarga dan pada lahan yang dimiliki secara turun temurun. Rendahnya produktivitas juga diakibatkan teknologi pertanian yang diwarisi secara turun temurun. Untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, sektor ini perlu dikelola menurut hukum pasar, dengan teknologi yang dikembangkan. Pemangku kepentingan perlu bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mencari teknologi pertanian yang tepat. Teknologi pertanian diperlukan untuk menentukan komoditas pertanian unggulan lokal dan juga metode pertanian agar produktivitas maksimal. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menciptakan permintaan pasar yang baik agar petani mau belajar dan bersedia meningkatkan produksi pertaniannya. Produk pertanian perlu diberi akses ke pasar agar produksi pertanian dapat mempunyai nilai ekonomi yang baik. Setiap petani sebagai produsen perlu dilindungi dan diberi akses ke pasar, agar produk pertanian dapat mempunyai nilai tambah yang baik. Pemerintah perlu membentuk dan memberdayakan Badan Urusan Logistik dan juga Badan Pengendali Inflasi Daerah untuk membeli produk pertanian jika hasilnya melebihi permintaan pasar sebagai akibat musim produksi.

Terlihat bahwa pada semua kelompok umur pekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat pekerja rumah tangga/tidak dibayar. Khusus untuk pekerja berusia muda proporsi yang bekerja pada keluarga/tidak dibayar sangat besar, lebih dari setengah. Strategi optimalisasi pekerja menurut kelompok umur dan sektor pekerjaan adalah mendorong pemangku kepentingan agar pekerja ini

dimonetarisasi. Pekerja tersebut perlu dan harus bekerja melalui pasar tenaga kerja dan diberi upah berupa uang.

Kesenjangan penghasilan merupakan salah satu yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama diakibatkan oleh besarnya proporsi pekerja pada keluarga dan tidak dibayar dan juga besarnya proporsi pekerja pada sektor pertanian (tradisional). Pekerja keluarga/tidak dibayar tidak mendapat penghasilan berupa uang. Pekerja di sektor pertanian mempunyai produktivitas rendah. Kedua sektor inilah yang perlu diberi penghasilan yang layak dan sesuai agar kesenjangan penghasilan dapat diturunkan. Untuk menurunkan kesenjangan penghasilan, pemangku kepentingan perlu mendorong pasar tenaga kerja berlaku bagi semua tenaga kerja agar pekerja keluarga/tidak dibayar mendapat penghasilan sesuai dengan mekanisme pasar tenaga kerja. Selanjutnya, dengan modernisasi sektor pertanian menjadi industri pertanian, maka pekerja di sektor pertanian dapat berpindah ke sektor industri yang memberi penghasilan yang lebih baik.

Kebijakan peningkatan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan peningkatan investasi. Gambar 3.27 memperlihatkan hubungan antara Investasi (Rp. Juta) dan Kesempatan Kerja (orang) di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2001-2013. Setiap penambahan investasi sebesar Rp. 1 juta akan mengakibatkan peningkatan atau penyerapan tenaga kerja sebanyak 0,036 orang. Artinya, jika dalam kurun waktu 2001-2013 dilakukan investasi sebesar Rp. 1 miliar, dalam jangka panjang akan menyerap tenaga kerja sebanyak 36 orang. Dengan demikian, pemangku kepentingan perlu terus menerus menarik investasi agar penduduk usia produktif dioptimalkan di Provinsi Provinsi Nusa Tenggara. Pemerintah perlu mengadakan pembangunan infrastruktur dan mengajak, mendorong, memfasilitasi pihak swasta untuk berinvestasi.

BAB 5

PENUTUP

Hasil kajian “Optimalisasi Penduduk Usia Produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur” menunjukkan bahwa permasalahan kependudukan dan keluarga berencana (KB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat kelahiran yang tinggi, migrasi neto penduduk usia produktif yang negatif, prevalensi KB yang rendah, dominasi metode KB jangka pendek, serta kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi yang tinggi. Permasalahan ketenagakerjaan meliputi dominasi angkatan kerja perdesaan dan berpendidikan rendah, pengangguran tinggi pada angkatan kerja usia muda, berpendidikan menengah dan tinggi dan di perkotaan, dominasi lapangan pekerjaan pertanian, dominasi pekerja keluarga/tidak dibayar dan kesenjangan penghasilan.

Rekomendasi kebijakan untuk penanganan permasalahan kependudukan dan keluarga berencana (KB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah penurunan tingkat kelahiran dan pengelolaan mobilitas penduduk. Rekomendasi kebijakan untuk penanganan permasalahan ketenagakerjaan dalam rangka optimalisasi penduduk usia produktif adalah peningkatan pendidikan angkatan kerja, peningkatan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda serta berpendidikan menengah dan tinggi, peningkatan keterampilan angkatan kerja di perkotaan, peningkatan produktivitas sektor pertanian, penurunan pekerja keluarga/tidak dibayar, dan penurunan kesenjangan penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2001a. Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2000. Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2001b. Penduduk Nusa Tenggara Timur Hasil Sensus Penduduk 2000. Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Penduduk Indonesia Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015. Jakarta, Indonesia. Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2016a. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2016. Jakarta, Indonesia. Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2016b. Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2016. Jakarta Indonesia.
- Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Departemen Kesehatan dan ORC Macro. 2003. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002-2003. Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Departemen Kesehatan dan ORC Macro. 2003. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002-2003. Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Departemen Kesehatan dan Macro International. 2008. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007. Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Kesehatan dan ICF International. 2013. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012. Jakarta, Indonesia.
- Biro Pusat Statistik. 1974a. Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 1971. Jakarta, Indonesia.
- Biro Pusat Statistik. 197b. Penduduk Nusa Tenggara Timur Hasil Sensus Penduduk 1971. Jakarta, Indonesia.
- Biro Pusat Statistik. 1983a. Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 1980. Jakarta, Indonesia.
- Biro Pusat Statistik. 1983b. Penduduk Nusa Tenggara Timur Hasil Sensus Penduduk 1980. Jakarta, Indonesia.
- Biro Pusat Statistik. 1992a. Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 1990. Jakarta, Indonesia.
- Biro Pusat Statistik. 1992b. Penduduk Nusa Tenggara Timur Hasil Sensus Penduduk 1990. Jakarta, Indonesia.

Biro Pusat Statistik, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Departemen Kesehatan dan Macro International Inc. 1992. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1991. Jakarta, Indonesia.

Biro Pusat Statistik, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Departemen Kesehatan dan Macro International Inc. 1995. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1994. Jakarta, Indonesia.

Biro Pusat Statistik, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Departemen Kesehatan dan Macro International Inc. 1998. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1997. Jakarta, Indonesia.

House, W.J. 1995. Integrating population factors in development planning. Pacific Health Dialog. Vol. 2. No.1. Original Papers.

Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik, dan United Nations Population Fund. 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Jakarta, Indonesia.

Kementerian Kesehatan. 2013. Riset Kesehatan Dasar 2013. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Jakarta, Indonesia.

Maliki. 2014. Implications of the Demographic Dividend on Government Policy in Indonesia. Dalam Policy in Focus: National Transfer Accounts and Generational Flows. No. 30. Hal.: 29-31. United Nations Development Programme.

Rajagukguk, W., Omas Bulan Samosir, Brigitte Inez Maitimo, Oktavianus Porajow, Dahamiaz Arnold Koda, dan Yacobus Yakob. 2015. Fakta dan Prospek Pemanfaatan Jendela Kesempatan Demografis: Suatu Studi Banding di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Karya Tulis Ilmiah. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Jakarta, Indonesia.

United Nations. 1995. Report of the International Conference on Population and Development. Cairo, 5-13 September 1994. New York, USA.

United Nations (UN). 2015. World Population Prospects: The 2015 Revision. Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

ntt.bps.go.id

sp2010.bps.go.id

www.bps.go.id